

VOL. 1, NO 1, JUNE 2021



Alfatina

Journal of Community Services

Published by

Institute for Policy Research Kepulauan Riau
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: alfatina@inspire-kepri.com

Website: <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS>

Alfatina: Journal of Community Services merupakan jurnal peer-review terbitan Institute for Policy Research Kepulauan Riau yang terbit 2 (dua) edisi dalam setahun (Juni dan Desember). Alfatina: Journal of Community Services merupakan jurnal peer review yang mempublikasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu, seperti iptek, sosial dan humaniora, pendidikan, ekonomi, hukum, informatika, kedokteran, dan kesehatan masyarakat.

Harap baca dan pahami pedoman penulis secara menyeluruh. Penulis yang mengirimkan naskah ke editor Alfatina; Journal of Community Services harus mematuhi pedoman penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka akan ditolak oleh tim redaksi sebelum direview. Tim editorial hanya akan menerima manuskrip yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan

Editor in-chief

Suyito Suyito | Affiliation : Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

Managing Editors

Mahadiansar Mahadiansar | Affiliation : Universitas Brawijaya, Indonesia.

Editorial Board

Bartholomeus Padatu | Affiliation : Capiya Inc, Makassar

Husni Setiawan | Affiliation : Scale-Up Riau

Tyka Rahman | Affiliation : IAIN Bukittinggi

Tri Samnuzulsari | Affiliation : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wayu Eko Yudiatmaja | Affiliation : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Yudithia Yudithia | Affiliation : Provincial Government of Kepulauan Riau

Editor Address

Vila Cendrawasih Blok F8 . Jalan Cendrawasih Kelurahan Bt IX,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang - Kepulauan Riau

Email: alfatina@inspire-kepri.com Website: inspire-kepri.org

OJS <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JocCS>

Published by

Institute for Policy Research of Kepulauan Riau

©Alfatina JoCS INSPIRE KEPRI, 2021

Daftar Isi

Pelatihan Pemanfaatan Akun Belajar Id Terintegrasi Dengan Rumah Belajar Bersama PGRI Provinsi Kepulauan Riau <i>Diah Siti Utari, Rianto Rianto</i> DOI: 10.31328/JoCS.v1i1.1640	01-06
Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir <i>Ramadhani Setiawan, Fitri Kurnianingsih</i> DOI: 10.3132/JoCS.v1i1.1418	07-16
Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat Usia Transisi (Remaja ke Dewasa) <i>Indriaty Wulansari</i> DOI: 10.3132/JoCS.v1i1.1395	17-21
Strategi Social Mapping di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang <i>Aspariyana Aspariyana</i> DOI: 10.3132/ JoCS.v1i1.1450	22-27
Implementation of Bulog Rice Procurement Policy for Realizing Food Security; Study at the Bulog Office of the Divre Sultra <i>Fedro Saputra</i> DOI: 10.3132/ JoCS.v1i1.1433	28-38
Kontribusi	52

Pelatihan Pemanfaatan Akun Belajar Id Terintegrasi Dengan Rumah Belajar Bersama PGRI Provinsi Kepulauan Riau

Diah Siti Utari¹ , Rianto Rianto² 

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

INFO ARTIKEL

INTI SARI

Proses Artikel

Unggah: 25 Mei 2021

Perbaikan: 01 Juni 2021

Diterima: 28 Juni 2021

Tersedia Daring: 30 June 2021

Korespondensi

Email: utari@stisipolrajahaji.ac.id

Penggunaan Platform Media telah banyak dipergunakan secara publik serta bebas biaya, memiliki kemampuan mengelola jutaan akun serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Selain itu akun tersebut dapat mengakses layanan lain milik Kemdikbud serta layanan pembelajaran lainnya di luar Google. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pendidik yang bertempat tugas di seluruh kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ini bermaksud untuk menyiapkan para pendidik agar mampu mengembangkan kompetensi diri dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam menunjang penyelenggaraan pembelajaran kepada peserta didik pada Pemanfaatan Akun Belajar.Id Terintegrasi Dengan Rumah Belajar Bersama PGRI Provinsi Kepulauan Riau. Metode teknik pelatihan menerangkan mode yang terdapat dalam akun Google dan semakin banyak hal yang dirasakan perlu oleh peserta ketahui melalui penjelasan atas pertanyaan yang diajukan peserta. Dari hasil pelatihan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Workshop Berseri Online kegiatan yang tiga dalam bentuk pelatihan daring ini dapat berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing indikator berdasarkan suara terbanyak.

Kata Kunci : Pelatihan, Belajar ID, Terintegrasi, Kepulauan Riau

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



PENDAHULUAN

Saat ini permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pembelajaran begitu dirasakan oleh pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dari 34 provinsi yang ada dan perbedaan aksesibilitas internet serta variasi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, kapasitas penyimpanan data yang terbatas, penggunaan perangkat tertentu yang menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun demikian kebijakan pemerintah untuk menerapkan Pembelajaran Daring atau Pembelajaran Jarak Jauh yang berbasis internet sampai saat ini masih terus diselenggarakan sebagai salah satu solusi terbaik metode pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya inovasi Kebijakan di bidang pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah melalui alternatif pembelajaran yang lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan akun layanan pembelajaran yang berbasis elektronik dengan mengakses akun elektronik yang diberi nama belajar.id baik oleh pendidik, peserta didik maupun tenaga kependidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google khususnya akun Google Suite for Education yang kemudian diubah menjadi Google

Workspace For Education merupakan perangkat digital pembelajaran yang sangat bermanfaat yang membuat banyak fasilitas untuk mendukung pembelajaran yaitu Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form, Google Calender dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi pendidik. Akun Google telah banyak dipergunakan secara publik serta bebas biaya, memiliki kemampuan mengelola jutaan akun serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Selain itu akun tersebut dapat mengakses layanan lain milik Kemdikbud serta layanan pembelajaran lainnya di luar Google. Walaupun akun Google ini juga dapat bebas diakses secara pribadi oleh Guru, namun terdapat perbedaan antara akun Google yang diakses secara pribadi dengan akun Google yang dikelola oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sejak diluncurkan Desember tahun 2020 yang lalu, namun belum semua pihak khususnya para pendidik yang bertempat tugas di seluruh kabupaten maupun kota mengetahui secara mendalam untuk mengoptimalkan pemanfaatan akun ini sehingga dirasa perlu dilakukan pelatihan pemanfaatan akun pembelajaran tersebut.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pendidik yang bertempat tugas di seluruh kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ini bermaksud untuk menyiapkan para pendidik agar mampu mengembangkan kompetensi diri

dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam menunjang penyelenggaraan pembelajaran kepada peserta didik. Tujuan kegiatan yaitu Mengembangkan pengetahuan para guru tentang akun layanan pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berbasis elektronik, Mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan akun belajar tersebut untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah (BDR) dan pengelolaan data, Memberikan berbagai alternatif pilihan media pembelajaran yang dapat diakses oleh para pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, bermakna dan menyenangkan bagi siswa sekaligus meningkatkan pengelolaan layanan administrasi pendidikan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan merupakan kegiatan kali kedua yang diselenggarakan atas kerjasama Duta Rumah Belajar dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dengan ini diawali dengan penelaahan proposal kegiatan yang diajukan berikut penyampaian informasi melalui website <http://cikgukepri.or.id> dan pembentukan telegram group yang ditujukan kepada seluruh yang menjadi target sasaran kegiatan ini. Selain itu, penyampaian informasi kegiatan yang akan dilakukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan kepada pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Penyampaian informasi mencakup tanggal dan hari pelaksanaan, jadwal kegiatan, formulir pendaftaran bahkan tutorial untuk masuk ke website <http://cikgukepri.or.id> yang menjadi akses penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan ini dilakukan secara daring/online dengan memanfaatkan website yang telah dibentuk (<http://cikgukepri.or.id>) mengingat kondisi saat ini pada masa pandemi dan tidak memungkinkan kegiatan dilakukan secara bertatap muka atau secara langsung. Dengan adanya informasi secara online, diharapkan dapat menjangkau peserta yang bertempat tugas di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kegiatan kali ini peserta kegiatan ditujukan pada pendidikan yang mengajar di jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Menengah.

Selanjutnya, dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi dan kegiatan pelatihan melalui praktek langsung penggunaan aplikasi oleh narasumber. Materi yang disampaikan oleh narasumber salah satunya persamaan maupun perbedaan yang menyolok antara akun google pribadi dengan akun google

yang di kelola oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia serta urgensi dimanfaatkan akun belajar.id oleh pendidik yang memuat banyak fasilitas yang dapat dipergunakan dalam mendukung kegiatan belajar dari rumah (BDR). Kegiatan yang akan dilakukan akan melalui daring dengan mempergunakan link Google Meeting yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari website <http://cigukepri.or.id> . Melalui website ini juga materi-materi narasumber dapat di akses oleh peserta. Selain itu narasumber juga akan membuat kelas group sendiri dengan memanfaatkan google Classroom yang juga akan diajarkan kepada narasumber. Kegiatan ini diselingi praktek langsung dari fasilitas yang tersedia di google Workspace for Education dan disertai penugasan secara mandiri yang menjadi dasar penerbitan sertifikat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Google Indonesia Partner dan Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1. Website Cigukepri.or.id yang Memuat Flayer Kegiatan



Sumber: <http://cigukepri.or.id>

Media kegiatan yang dipergunakan adalah Google Meet yang selanjutnya dapat diunduh setelah sebelumnya peserta mendaftar melalui <http://cigukepri.or.id> dan hanya akan terbuka pada saat kegiatan dimulai. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini serta mendapatkan masukan menyangkut materi lanjutan sesuai kebutuhan peserta untuk kegiatan di masa yang akan datang maka setiap selesai pertemuan daring pada hari itu, maka peserta akan mengisi survei daring dari penyelenggara. Survei daring yang diberikan kepada peserta hanya diberikan satu kali saja pada hari terakhir kegiatan. Survey berikan penilaian peserta terkait penyelenggaraan kegiatan dan masukan untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Peserta dapat mengunduh link survei dan memilih 5 (lima) alternatif jawaban dari setiap instrument pertanyaan. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data survei untuk menghasilkan informasi terkait kegiatan yang melalui beberapa tahapan kegiatan yakni mengunduh data hasil link survei di google form, mengkonversi data link dalam bentuk coding dan skala pengukuran sesuai alternatif jawaban di template Excel, Pemindahan data dan pengolahan data dalam program SPSS versi 22, pemindahan data Perubahan hasil informasi data output SPSS dalam bentuk grafik batang di template Excel. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber yang merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Riau, Google Master Trainer dan GTK Kemdikbud, yaitu Bapak Sumadi. Beliau juga seorang guru pada salah satu sekolah yaitu SMPN 26 di Kota Batam.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama (03 Maret 2021)

Kegiatan Wokshop bertemakan “Pelatihan Google Workspace For Education” yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau merupakan kelanjutan Workshop Berseri Online dikarenakan dilaksanakan melalui online (daring) melalui Zoom Meeting yang dapat diakses melalui <http://cikgukepri.or.id>. Peserta yang mengikuti berasal dari sekolah/madrasah dari berbagai jenjang pendidikan dan dari berbagai kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Namun berbeda dengan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan, maka untuk kegiatan kedua ini media yang digunakan bukanlah Zoom Meeting namun mempergunakan Google Meet yang tersedia secara gratis.

Materi Pokok yang disampaikan pada hari pertama ini berkaitan informasi inovasi kebijakan pemerintah dalam merespon kondisi pandemi dengan melakukan membuat akun layanan pembelajaran belajar.id yang berbasis elektronik yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk akun Google serta dapat dimanfaatkan oleh pendidik maupun peserta didik. Peserta diperkenalkan perbedaan fasilitas Google yang dilakukan secara mandiri yang selama ini digunakan peserta dengan fasilitas Google yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui akun layanan pembelajaran, yaitu belajar.id. Materi selanjutnya terkait dengan pengelolaan drive di Google serta mengelola Google Docs dan Google Slides. Peserta juga diajarkan membuat Twibon. Diakhir kegiatan setiap peserta akan diberikan tugas mandiri oleh Narasumber dan mengirim pada template Google Classroom yang telah disediakan. Seluruh peserta yang mengisi daftar hadir akan mengikuti kegiatan dan pada sesi tertentu selama hari pelaksanaan kegiatan akan melaksanakan pengiriman tugas mandiri dengan batas waktu yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama (04 Maret 2021)

Seperti hari pertama, maka peserta akan melakukan pendaftaran sekaligus bukti kehadiran melalui online (daring) yang dapat diakses melalui <http://cikgukepri.or.id>. Selanjutnya, peserta akan memasuki link Google Meet yang tersedia dan mengikuti kegiatan pada hari kedua sampai selesai. Di hari kedua ini materi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu Google Forms, Google Meets dan Google Calender. Seluruh peserta yang mengisi daftar hadir akan mengikuti kegiatan dan pada sesi tertentu selama hari pelaksanaan kegiatan akan melaksanakan pengiriman tugas mandiri.

3. Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama (05 Maret 2021)

Seperti hari kedua, maka pada hari ketiga peserta akan melakukan pendaftaran sekaligus bukti kehadiran melalui online (daring) yang dapat diakses melalui <http://cikgukepri.or.id>. Selanjutnya, peserta akan memasuki link Google Meet yang tersedia dan mengikuti kegiatan pada hari kedua sampai selesai. Dalam kegiatan hari ketiga ini paserta akan mempelajari dan mempraktekkan cara membuat dan mengelola Google Classroom untuk pembelajaran dan mengelola email di Google. Seluruh peserta yang mengisi daftar hadir akan mengikuti kegiatan dan pada sesi tertentu selama hari pelaksanaan kegiatan akan melaksanakan pengiriman tugas mandiri.

Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan peserta; Dari angket yang disebar, tanggapan terbanyak responden peserta mayoritas mengatakan bahwa materi pelatihan sangat sesuai dengan kebutuhan peserta. Materi yang diberikan selama 3 hari ini membuat peserta memahami begitu banyaknya fasilitas dalam Google yang dapat membantu pengelolaan belajar daring, apalagi didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mendukung pembelajaran daring ini melalui pembuatan akun layanan pembelajaran yang sangat tidak terbatas penyimpanan drivenya. Dan tentunya ini sangat sesuai dengan kebutuhan para peserta.

Kelengkapan materi yang diterima peserta setiap pertemuan; Dari angket yang disebar, tanggapan terbanyak responden peserta mayoritas mengatakan bahwa materi pelatihan yang diterima peserta di setiap hari kegiatan lengkap. Hal ini dapat terlihat dari ragam materi yang disampaikan yang disertai kebijakan pemerintah, tutorial yang dapat dilihat melalui YouTube, materi tertulis dan disertai beberapa soal praktek secara mandiri. Namun memang materi tidak memuat tahapan pengerjaan secara lebih rinci. Responsivitas penyelenggara selama pelaksanaan berlangsung; Dari angket yang disebar, tanggapan terbanyak responden peserta mayoritas mengatakan bahwa penyelenggara sangat responsif dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dan kebutuhan peserta. Hal ini dapat terlihat di group telegram yang menjadi salah satu media komunikasi peserta, narasumber dan panitia.

Kejelasan informasi yang di sampaikan oleh penyelenggara; Dari angket yang disebar, tanggapan terbanyak responden peserta mayoritas mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh panitia PGRI Provinsi Kepulauan Riau jelas khususnya berkaitan dengan jadwal, sesi pemberian materi. Penguasaan materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri; Berdasarkan tanggapan responden, jawaban terbanyak menyatakan bahwa narasumber sangat menguasai semua materi yang disampaikan di setiap sesi penyampaian materi. Hal ini dikarenakan Narasumber merupakan Master Trainer Google. Narasumber juga dengan penuh kesabaran mengulang tahapan penggunaan akun Google dari Kemdikbud jika peserta meminta pengulangan.

Interaksi komunikasi dengan peserta pelatihan; Terkait dengan komunikasi yang terjalin antara narasumber dengan peserta yang mengikuti kegiatan menunjukkan bahwa tanggapan terbanyak responden menyatakan adanya interaksi komunikasi yang tercipta selama pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan waktu selama pelaksanaan pelatihan; Agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, maka diperlukan pengelolaan waktu setiap sesi materi di 3 (tiga) hari kegiatan . Berdasarkan jawaban terbanyak responden menyatakan bahwa adanya pengelolaan waktu. Walaupun terkadang peserta tetap bertanya walaupun waktu telah habis di akhir kegiatan. Teknik penyajian materi pelatihan; Variasi di dalam melakukan penyajian materi sangat diperlukan, maka diperlukan penyampaian materi yang bervariasi dalam aspek teknik penggunaan media. Berdasarkan tanggapan terbesar responden menyatakan adanya variasi dalam hal teknik penyampaian materi. Dalam pelaksanaan kegiatan, menerangkan mode yang terdapat dalam akun Google dan semakin banyak hal yang dirasakan perlu oleh peserta ketahui melalui penjelasan atas pertanyaan yang diajukan peserta. Seperti pembuatan huruf arab yang dapat dimanfaatkan oleh Guru Bahasa Arab.

Pemahaman peserta atas penyampaian materi pelatihan atau narasumber; Dikarenakan adanya kendala jaringan berupa kemampuan akses berbeda-beda dari semua peserta menyebabkan adanya perbedaan pemahaman peserta atas materi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Berdasarkan tanggapan terbanyak responden menyatakan bahwa peserta paham atas penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber. Kepahaman peserta dapat dilihat dari respon peserta serta bukti tugas yang dikirimkan tepat waktu di Google Classroom kelompok. Kepuasan peserta terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan; Pada akhirnya, secara keseluruhan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh PGRI Provinsi Kepulauan Riau maka berdasarkan tanggapan terbesar responden menyatakan puas atas semua kegiatan yang telah diselenggarakan .

KESIMPULAN

Dari hasil survei yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Workshop Berseri Online kegiatan yang tiga dalam bentuk pelatihan daring ini dapat berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing indikator berdasarkan suara terbanyak. Pada beberapa instrumen pertanyaan survei, tanggapan terbanyak responden bervariasi. Dari paparan kesimpulan maka Pada kegiatan kali ini jumlah

peserta di dominasi domisili tempat tugas yang berasal dari Kota Batam. Pengelolaan waktu didalam penyelenggaraan harus terus dilakukan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien. Responsivitas penyelenggara dalam menanggapi kebutuhan dan kendala peserta selama mengikuti kegiatan dapat dipecahkan. Informasi terkait penyelenggaraan kegiatan harus terus disampaikan baik melalui media surat tertulis, media sosial dan group komunitas dengan rentang waktu yang cukup. Mengingat banyak ragam materi yang harus dipelajari, dengan waktu yang terbatas membuat beberapa materi tidak terekplorasi secara maksimal .

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan kegiatan ini yaitu : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Ketua dan Wakil ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi kepulauan Riau , Ketua STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang atas ijin yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas di bidang pengabdian masyarakat ini, Seluruh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau , Bapak Narasumber Google Trainer Master Kemdikbud, Pengelola website <http://cikgukepri.or.id> dan Seluruh peserta kegiatan Pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://cikgukepri.or.id>

Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir

Ramadhani Setiawan¹ , Fitri Kurnianingsih² 

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau

²Program Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau

INFO ARTIKEL

INTI SARI

Proses Artikel

Unggah: 17 Mei 2021

Perbaikan: 30 Mei 2021

Diterima: 15 Juni 2021

Tersedia Daring: 30 June 2021

Korespondensi

Email: ramadhanisetiawan@gmail.com

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah sesungguhnya menjadi harapan bagi perwujudan tatakelola sampah menuju Kota Tanjungpinang bersih. Perda ini mengusung gagasan sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Leading-sector nya adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dirancang dengan metode terpola berbentuk model terpadu pelayanan Bank Sampah berorientasi kondisi pesisir (kondisi khas masyarakat tradisional Tanjungpinang Kepulauan Riau dengan gaya bermukim di rumah panggung atas laut dan buang sampah ke laut). Rancangan ini akan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan meliputi Seleksi lokasi, Sosialisasi kegiatan, Penyadaran atau edukasi masyarakat, Pelaksanaan kegiatan, Evaluasi, dan Rencana Tindak Lanjut.

Kata Kunci : Bank Sampah, Model Penyusunan, Kawasan Pesisir

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



PENDAHULUAN

Persoalan persampahan merupakan hal yang sangat krusial, bahkan dapat diartikan sebagai masalah kultur karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan terutama di kota besar. Meningkatnya biaya sosial setiap aktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya di Kota Tanjungpinang, maka akan terjadi kemunduran kualitas lingkungan kota itu sendiri. Kemunduran kualitas lingkungan dapat dirasakan dari kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kebisingan bunyi mesin kendaraan, kekumuhan akibat kotoran sampah kota dan limbah industri, kurang tertatanya taman-taman kota dengan baik dan lain-lain merupakan suatu masalah yang selalu timbul di kota besar dan pembangunan yang terjadi di perkotaan selalu diiringi dengan penambahan jumlah penduduk. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat tentunya memerlukan berbagai kebutuhan pasokan dan produk konsumsi yang menggunakan kemasan mempengaruhi timbunan sampah yang ada di kota-kota besar. Istilah sampah pasti sudah tidak asing lagi ditelinga kita, dan jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma busuk tak sedap yang sangat menyengat.

Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan sekitarnya. Dalam proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam itu berlangsung. Pertambahan jumlah penduduk, peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan, menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang

semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Persoalan sampah menjadi lebih rumit dan berdampak serius pada setting kehidupan masyarakat di kawasan pesisir. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang secara alamiah mengintegrasikan pada umumnya banyak aktivitas kehidupannya dengan laut, baik dalam hal mata pencaharian maupun dalam hal bermukim. Salah satu representasi dari masyarakat pesisir adalah masyarakat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun berstatus "Kota", namun kondisi khas masyarakat tradisional pesisir masih kental ditemukan di kawasan ini. Kecenderungan pola bermukim masyarakat pesisir adalah di pinggir pantai atau berbentuk rumah panggung atas laut di area bibir pantai. Posisi bermukim ini kemudian diikuti oleh kebiasaan membuang sampah langsung ke laut. Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan masyarakat yang mayoritas berlalu lalang melalui jalur laut suka membuang sampah ke laut -baik dari atas kapal maupun saat menunggu dipelabuhan/dermaga-. Hal ini menimbulkan timbunan sampah di bibir pantai yang tidak saja merusak pandangan melainkan juga membahayakan keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagai leading sector dalam pengelolaan sistem persampahan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup berkewajiban mengupayakan penanganan sampah kota tersebut secara optimal. Oleh karena itu seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah, dimana ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan sebuah pemberdayaan masyarakat. Disamping itu juga pelaksanaan koordinasi secara operasional antara Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup dalam penanganan persampahan harus terus dilakukan demi tercapainya kota yang bersih.

Pengelolaan sampah secara terpadu ini belum berjalan dengan semestinya, hal ini ditunjukkan dari berbagai keluhan mengenai sampah di Kota Tanjungpinang :

1. Pengelolaan sampah masih berorientasi hilir, ini ditunjukkan dengan adanya tumpukan sampah menahun, di Pelantar II Kota Tanjungpinang, yang terjadi karena kebiasaan membuang sampah di laut ditambah dengan pengaruh air pasang, angin kencang dan gelombang kuat yang menjadi sampah menumpuk. Wakil Walikota saat itu pada tahun 2013, Bapak Syahril mengatakan akan ada program alat angkut sampah di laut yaitu taksi sampah. (www.haluankepri.com)
2. Alternatif yang belum berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan riil di tengah masyarakat sehingga akan berdampak pada masalah berikutnya. Hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah ketika pelaksanaannya di lapangan berinisiasi untuk melakukan pengelolaan sampah menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan Universitas Padjadajaran (Unpad) dan melibatkan sebuah PT. Bumi Resik Bandung. (www.batam.tribunnews.com)
3. Masih mengandalkan pengolahan sampah yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan. Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet terus menumpuk dan belum diolah. Saat ini masih sebatas upaya memanfaatkan gas metanol dari tumpukan sampah yang ada tersebut. (www.batam.tribunnews.com)

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan upaya pembangunan berbasis masyarakat, yang kita kenal dengan pemberdayaan masyarakat. Chambers (1995) dalam Kartasmita (1996) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable". (Theresia, dkk, 2014). Hasil kajian dari berbagai proyek yang dilakukan oleh International Fund for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah

memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sector-sector yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula. (Brown, 1995 dalam Theresia, dkk, 2014)

Pendekatan utama dalam sebuah upaya konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Oleh karena itu, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut Upaya itu harus terarah, yang dimaksudkan bahwa upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya; Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dan Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. (Theresia, dkk, 2014).

Oleh karena itu, salah satu alternatif yang ditawarkan dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang -yang memproduksi sampah 100-150 ton/ hari-, hendaknya bermuara dari hulu ke hilir. Selain itu, alternatif yang akan diusulkan ini telah diterapkan di berbagai kota lain, salah satunya Kota Batam yang secara administratif berada di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya perubahan sosial yang dimulai dari masyarakat ini adalah Bank Sampah, Berkaitan dengan lokasi dan karakteristik masyarakat maka dengan ini, kegiatan yang diusulkan adalah Penyusunan model pelayanan Bank Sampah sebagai alternatif penyelesaian masalah sampah di kawasan pesisir.

METODE

Tahap program pengabdian masyarakat untuk penyusunan model pelayanan Bank Sampah sebagai alternatif penyelesaian masalah sampah di kawasan pesisir (studi pada Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau) tidak akan terlepas dari konsep pembangunan berbasis masyarakat. Dalam sebuah konsep pemberdayaan, menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Bagan 1. Siklus Pembangunan Berbasis Masyarakat



Sumber: Wilson (Sumaryadi, 2004 dalam Theresia, 2014)

Adapun upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang akan melaksanakan serta memberdayakan.(Theresia, dkk, 2014). Berdasarkan siklus tersebut, maka tahapan dalam penyusunan model pelayanan Bank Sampah sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah sampah di kawasan pesisir, akan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Seleksi lokasi, yaitu dalam rangka penetapan dan pengenalan wilayah kerja.
2. Sosialisasi kegiatan, yaitu merupakan sebagai upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan

penyusunan model pelayanan Bank Sampah yang akan di wilayah pesisir.

3. Penyadaran masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, amupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/ teknis, social budaya, ekonomi dan politik
4. Pengorganisasian masyarakat, yaitu melakukan pemilihan pemimpin dan kelompok-kelompok tugas (Itask group) yang akan dibentuk.
5. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi (a) berbagai pelatihan untuk menambah dan atau memperbaiki pengetahuan teknis tentang pengelolaan sampah, keterampilan manajerial serta perubahan sikap/ wawasan terhadap pengelolaan sampah
6. Evaluasi, yaitu melakukan pengukuran terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dengan menentukan beberapa indikator berdasarkan pedoman model pelayanan Bank Sampah yang telah disusun bersama.
7. Rencana Tindak Lanjut, dengan melakukan (a) advokasi kebijakan yaitu kegiatan untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat serta (b) politisasi yaitu terus-menerus memelihara dan meningkatkan posisi-tawar melalui kegiatan politik praktis. (Mardikanto, 2010 dalam Theresia, 2015)

Tabel. 1 Metode Pendekatan Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah

NO	TAHAPAN	METODE	PERAN MASYARAKAT
1	Seleksi lokasi	Survey lokasi dengan melakukan observasi	Memberikan informasi data empiris di lapangan dan menggambarkan kebutuhan, potensi yang dimiliki serta hambatan yang ada di lingkungan
2	Sosialisasi Kegiatan	Percakapan/ Dialog, Pertemuan, Ceramah, Diskusi	Masyarakat mengetahui perannya, pihak-pihak yang terlibat, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan
3	Penyadaran masyarakat	Focus Group Discussion, Pelatihan	Bersama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi, analisis faktor penyebab masalah, alternative pemecahan, dan menunjukkan pentingnya perubahan
4	Pengorganisasian masyarakat	Pertemuan	Sebagai pihak yang ditunjuk untuk menggerakkan Bank Sampah
5	Pelaksanaan kegiatan	Demonstrasi Cara, Demonstrasi Hasil, Demonstrasi Cara dan Hasil	Masyarakat sebagai yang diberdayakan dan memberdayakan anggota masyarakat lainnya
6	Evaluasi	Focus Group Discussion	Masyarakat ikut peran serta aktif mengevaluasi berdasarkan hasil dari tahapan penyadaran yang telah disepakati
7	Rencana Tindak Lanjut	Kunjungan, Pertemuan, Anjang Sana, Anjang Karya, FGD	Masyarakat ikut serta untuk menunjukkan kepada pada pemangku kepentingan agar bersama melakukan perubahan social

Sumber : Olahan Penulis, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis (Rahardyan dan Widagdo 2005). Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafrudin dan Priyambada 2001). Komponen-komponen tersebut meliputi : 1. Sub sistem teknis Operasional (sub sistem teknik), 2. Sub sistem organisasi dan manajemen (sub sistem Institusi), 3. Sub sistem hukum dan Peraturan (sub sistem Hukum), 4. Sub sistem Pembiayaan (sub sistem finansial) 5. Sub sistem peran serta masyarakat.

Sub sistem teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah. Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah ditujukan pada proses pengumpulan sampah mulai dari produsen sampah pada tempat pembuangan sampah akhir (TPA), membuat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan dan pengelolaan pada TPA. Sebelum dimusnahkan, sampah dapat diolah terlebih dahulu untuk memperkecil volume yang di daur ulang atau dimanfaatkan kembali. Berdasarkan karakteristiknya pengolahan sampah dilakukan berbagai cara yakni : 1. Komposting, baik bagi jenis garbage. 2. Insinerasi untuk refuse. 3. Proses lain seperti pembuatan bahan bangunan dari buangan industri yang mempunyai sifat seperti semen.

2. Timbulan Sampah

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah: a. Jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk meningkat timbulan sampah meningkat. b. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi seseorang akan semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan. c. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya. Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu negara dengan negara lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah antara lain :

- a. Tingkat hidup : makin tinggi tingkat hidup, makin banyak sampah yang ditimbulkan
- b. Pola hidup dan mobilitas masyarakat
- c. Kepadatan dan Jumlah penduduk
- d. Iklim dan musim
- e. Pola penyediaan kebutuhan hidup dan penanganan makanan
- e. Letak geografis dan topografi

Berdasarkan data BPS tahun 2000 dalam Wibowo dan Djajawinata (2004), dari 384 kota menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari, penanganan sampah yang diangkut ke dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6% , yang dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3 %. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan timbulan sampah pada perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut yang jumlah maupun kondisinya

kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, dan belum diterapkannya pendekatan *reduce, reuse* dan *recycle* (3 R).

3. Pewadahan dan Pemilahan Sampah

Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Dalam operasional pengumpulan sampah, masalah pewadahan memegang peranan yang sangat penting, tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk mencegah sampah agar jangan berserakan yang akan memberi kesan atau terlihat kotor serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan, sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan atau penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah. Dalam melakukan pewadahan harus disesuaikan dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu : 1) sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap; 2) sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam, dan lainnya, dengan wadah warna terang; 3) sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku (Departemen Pekerjaan Umum, 2002).

Dalam menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah, perlu adanya pewadahan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik rumah. Tempat sampah juga harus direncanakan dengan pertimbangan kemudahan dalam proses pengumpulan, higienis untuk penghasil sampah maupun petugas penumpul, kuat dan relatif lama serta mempertimbangkan segi estetika. Kapasitas pewadahan ini diperhitungkan berdasarkan rata-rata laju timbulan sampah per orang per hari, jumlah anggota keluarga serta frekuensi pengumpulan. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, bila data pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung timbulan sampah dapat digunakan nilai timbulan sebagai berikut :
a. Satuan timbulan sampah kota besar : 2 - 2,5 liter/orang/hari atau 0,4-0,5 kg/orang/hari
b. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil : 1,5-2 liter/orang/hari atau 1,3 - 1,4 kg/orang/hari.

Persyaratan bahan yang digunakan sebagai pewadahan sampah adalah tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, mudah di peroleh atau di buat oleh masyarakat serta mudah dan cepat dikosongkan (Departemen Pekerjaan Umum, 2002). Sedangkan penentuan ukuran volume ditentukan berdasarkan: 1) Jumlah penghuni tiap rumah; 2) Timbulan sampah; 3) Frekuensi pengambilan sampah; 4) Cara pengambilan sampah; 5) Sistem pelayanan (individual atau komunal). Berdasarkan standar SNI 19-2454-2002 yang dimaksudkan dengan pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Pewadahan ini dilakukan pada sampah yang telah dipilah yakni sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya beracun. Pola pewadahan terdiri dari pola individual dan pola komunal.

Pola pewadahan individual adalah aktivitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah khusus untuk dan dari sampah individu, sedangkan pola komunal adalah aktivitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber maupun sumber umum. Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standar Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. Selain itu ukuran wadah sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya Jumlah penghuni tiap rumah, Timbulan sampah, Periode pengambilan sampah, Cara pemindahan sampah, Sistem pelayanan.

Wadah sampah komunal pengadaanya dilakukan oleh instansi pengelola sedangkan wadah individual disediakan oleh pribadi atau instansi pengelola. Selain hal tersebut diatas, di dalam standar nasional pengelolaan sampah juga diatur lokasi penempatan wadah yakni Untuk wadah individu

penempatannya di halaman muka dan di halaman belakang untuk sumber sampah dari hotel dan restoran dan Penempatan wadah komunal diharapkan sedapat mungkin dekat dengan sumber sampah dan tidak mengganggu pemakai jalan dan sarana umum lainnya, jarak antar wadah sampah untuk pejalan kaki minimal 100 meter, disekitar taman dan keramaian, diujung gang kecil, dan diluar jalur lalu lintas pada suatu lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya.

Menurut SNI 19-2454-2002 yang dimaksud dengan pemilahan sampah adalah proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumbernya sampai dengan pembuangan akhir. Pewadahan dan pemilahan sampah yang baik akan selalu mempengaruhi kinerja daur ulang sampah yang lebih baik. Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), tujuan dari pewadahan adalah “untuk memudahkan dalam pengangkutannya dan selain itu dengan penggunaan wadah ini, bau akibat pembusukan sampah yang juga dapat menarik perhatian lalat dapat diatasi, air hujan yang berpotensi menambah kadar air sampah dapat dikendalikan dan pencampuran sampah yang tidak sejenis dapat dihindari”.

4. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari sumber satu tempat pewadahan penampungan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). TPS yang digunakan biasanya kontainer kapasitas 10 m³, 6 m³, 1m³, transper depo, bak pasangan batubata, drum bekas volume 200 liter, dan lain-lain. Pengambilan sampah dilakukan tiap perodesasi tertentu. Perodesasi biasanya ditentukan berdasarkan waktu pembusukan yaitu kurang lebih setelah berumur 2-3 hari, yang berarti pengumpulan sampah dilakukan maksimal setiap 3 hari sekali.

- a. **Sistim Pengumpulan;** Pengumpulan sampah dari tiap-tiap sumber sampah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) Sistem tidak langsung Di daerah pemukiman yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kondisi jalan pemukiman yang sempit, pengumpulan sampah dilakukan dengan gerobak sampai yang mempunyai volume rata-rata 1 m³. Untuk kemudian diangkut ke TPS. Sampah dari pasar dan hasil sapuan jalan biasanya dikumpul dalam kontainer atau TPS dekat pasar yang kemudian diangkut Truk ke TPA. 2) Sistem Langsung, terdiri dari 1) Pengumpulan individu langsung, Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan ber-samaan. Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dari wadah-wadah sampah rumah/persil kemudian dimuat ke kendaraan langsung dibawa ke TPA. Alat pengumpul berupa truck standar atau dump truck, dan sekaligus berfungsi sebagai alat pengangkut sampah menuju TPA. Daerah yang dilayani dengan sistem ini adalah daerah pemukiman teratur (formal area) dan daerah perkotaan dimana pada daerah-daerah tersebut sulit untuk menempatkan transfer dipo atau kontainer angkut karena kondisi, sifat daerahnya ataupun standar kesehatan masyarakat dan standar kenyamanan masyarakat cukup tinggi. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam sistem ini adalah Kondisi topografi (rata-rata > 5 %) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi, Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak menunggu pemakai jalan lainnya, Kondisi dan jumlah alat memadai, Jumlah timbulan sampah > 3 m³/hari.
- b. **Waktu Pengumpulan;** Waktu pengumpulan yang dimaksudkan adalah waktu yang terbaik untuk melakukan pengumpulan. Pada umumnya pengumpulan sampai dilakukan pada pagi hari atau siang, akan tetapi pada tempat-tempat tertentu misalnya pasar, waktu pengumpulannya biasanya malam hari. Tata cara operasional pengumpulan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Rotasi 1-4 rit/hari. 2) Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari tergantung kondisi komposisi sampah, yaitu :
 - Semakin besar prosentasi sampah organik periodisasi pelayanan maksimal sehari 1 kali;

- Untuk sampah kering, untuk pelaksanaan periode pengumpulannya di sesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan lebih dari 3 hari 1 kali;
- Untuk sampah B3 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap;
- Mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara periodik;
- Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah.

Pelaksanaan pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh institusi kebersihan kota, lembaga swadaya masyarakat, swasta, masyarakat (RT/RW). Jenis sampah yang terpilah dan bernilai ekonomi dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang telah disepakati bersama antara petugas pengumpul dan masyarakat penghasil sampah.

- c. **Frekuensi Pengumpulan;** yakni banyaknya sampah yang dapat dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin tinggi frekuensi pengumpulan sampah semakin banyak jumlah sampah yang dikumpulkan per pelayanan per kapita. Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat diperkirakan. Frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan kegiatannya. Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 hari sekali atau maksimal 2 kali dalam seminggu. Meskipun pelayanan yang lebih sering dilakukan adalah baik, namun biaya operasional akan menjadi lebih tinggi sehingga frekuensi pelayanan harus diambil yang optimum dengan memperhatikan kemampuan memberikan pelayanan, jumlah volume sampah, dan komposisi sampah (Irman, 2002).

5. Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk di bawa ke tempat pembuangan akhir (Departemen Pekerjaan Umum, 2002). Operasi pemindahan dan pengangkutan menjadi diperlukan apabila jarak angkut ke pusat pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis. Hal tersebut juga menjadi penting bila tempat pemrosesan berada di tempat yang jauh dan tidak dapat dijangkau langsung. Tempat penampungan/ pembuangan sementara (TPS) merupakan istilah yang lebih populer bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan istilah transfer depo. Persyaratan TPS/transfer depo yang ramah lingkungan adalah: a. Bentuk fisiknya tertutup dan terawat. b. TPS dapat berupa pool gerobak atau pool kontainer. c. Sampah tidak berserakan dan bertumpuk diluar TPS atau kontainer. Tipe pemindahan sampah menggunakan tranfer depo antara lain menggunakan Tranfer tipe I dengan luas lebih dari 200 m² yang merupakan tempat peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum pemindahan serta sebagai kantor dan bengkel sederhana, tranfer tipe II dengan luas 60-200 m² yang merupakan tempat pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum tempat pemindahan dan merupakan tempat parkir gerobak atau becak sampah. Transfer tipe III dengan luas 10-20 m² yang merupakan tempat pertemuan gerobak dan kontainer (6-10 m³) serta merupakan lokasi penempatan kontainer komunal (1- 10 m³).

6. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah langsung dari sumber sampah dengan sistim pengumpulan individual langsung atau pengumpulan melalui sistim pemindahan menuju TPA. Pola pengangkutan dengan sistim pengumpulan individual langsung, kendaraan dari pool menuju titik sumber sampah dan mengambil sampah setiap titik sumber sampah sampai penuh, selanjutnya diangkut ke TPA. Setelah truk dikosongkan selanjutnya truk mengambil sampah di lokasi lainnya dan

seterusnya sesuai jumlah ritase yang telah ditetapkan. Pengangkutan dengan sistim pemindah, truck dari pool menuju lokasi pemindah lalu dibawa ke TPA, selanjutnya pengambilan ke pemindah lain sesuai ritase yang telah ditetapkan.

7. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya sebagai upaya kegiatan pembuangan akhir sampah yang ada, tempat menyingkirkan atau mengkarantinakan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11- 1991-03). Berdasarkan data JICA dan PT. Arkonin dalam Wibowo dan Djajawinata 2004, dari 46 kota yang memiliki TPA terdapat 3 jenis sistem pembuangan akhir yang dilakukan yaitu *Open Dumping* (33 kota), *Sanitary landfill* (1 kota) dan *controlled landfill* (12 kota). Pertimbangan penentuan Lokasi TPA, mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dengan penekanan pada beberapa hal sebagai berikut: a. Keberadaan dan letak fasilitas publik, perumahan, b. Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan c. Kondisi hidrogeologi d. Kondisi klimatologi e. Jalur jalan f. Kecepatan pengangkutan g. Batas pengangkutan (jalan, jembatan, underpass) h. Pola lalu lintas dan kemacetan i. Waktu pengangkutan j. Ketersediaan lahan untuk penutup (jika memakai sistem sanitari landfill) k. Jarak dari sungai l. Jarak dari rumah dan sumur penduduk Faktor-faktor yang mempengaruhi umur teknis tempat pembuangan akhir sampah (TPA) : Volume riil yang masuk ke dalam TPA, Pemadatan sampah oleh alat berat, Volume sampah yang diangkut oleh pemulung, Batas ketinggian penumpukan sampah, Ketinggian tanah urugan dan Susut alami sampah. Dengan demikian umur teknis dari suatu TPA merupakan fungsi dari Volume rill, pemadatan, volume sampah yang diangkut pemulung, batas ketinggian, ketinggian tanah urugan dan susut sampah.

Pembahasan Hasil Kegiatan

Menurut Kodoati (2005) dalam penelitian Alfiandra (2010), bahwa dalam sistem manajemen pengelolaan sampah ada lima sub sistem yang saling terkait yaitu: kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat Pada aspek kelembagaan, institusi pengelola persampahan dilakukan oleh instansi yang terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaannya berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. (Sulisa, dkk : 2018) Pada aspek teknik operasional, dipilih suatu cara yang sesuai dengan kondisi persampahan yang ada. Biasanya di kota-kota besar menerapkan cara konvensional, yaitu membuang sampah mulai dari sumbernya kemudian dibuang langsung atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu juga ada yang menerapkan pengelolaan sampah secara 3R yaitu (*reduce, reuse dan recycle*).

Pada aspek pembiayaan, dibutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk sistem pengelolaan persampahan agar dapat bergerak dengan lancar baik dengan bantuan dana dari luar maupun dengan pembiayaan sendiri. Pembiayaan dalam sistem pengelolaan persampahan diperlukan untuk pembiayaan pembangunan ataupun perawatan dalam peningkatan sarana dan prasarana, upah tenaga operasional dan pemeliharaan. Pada aspek peraturan, perlunya peraturan baik dalam bentuk Undang-undang maupun Perda untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif, antara lain berisi tentang pengelolaan sampah 3R yaitu pemisahan sampah organik dan anorganik, serta memungkinkan pihak swasta ikut serta dalam mengelola sampah di TPA. Bank sampah merupakan salah satu solusi pengurangan sampah yang berasal dari rumah tangga. Konsep 3R dikedepankan dalam manajemen pengelolaan bank sampah. Upaya pengurangan ini mengedepankan konsep pemberdayaan melalui tahap penyadaran terlebih dahulu, hingga berjalan kepada tahap intelektual untuk melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah wilayah pesisir tidak dapat diselesaikan dengan sistem pengelolaan konvensional saja. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang berbeda dengan wilayah lainnya, menuntut masyarakat lebih berdaya untuk melakukan pengelolaan sampah khususnya dengan memulai dan mengaktifkan Unit Bank Sampah sebagai salah satu upaya pengurangan sampah di Kota Tanjungpinang. Jumlah UBS di Kota Tanjungpinang sebanyak 10 UBS, tidak mengalami peningkatan aktivitas dalam pengelolaannya sehingga akademisi diperlukan kehadirannya untuk mengaktifkan kembali aktivitas UBS sebagaimana daerah lainnya. Upaya pengabdian masyarakat yang dilakukan disambut dengan respond yang sangat positif karena kegiatan ini akan mendorong terjadinya *open dialogue* antara para pihak yang seharusnya ikut serta dan terlibat sehingga UBS lebih optimal.

Optimalisasi UBS hanya bisa dilaksanakan ketika *stakeholders* semua bekerjasama sebagaimana digambarkan dalam konsep *penta helix collaboration*. Berikut saran yang direkomendasikan Pemerintah, dapat menjalankan fungsi administrasi, pengaturan kebijakan dalam hal pengelolaan UBS, missal kebutuhan akan standar harga barang yang dapat diterima oleh UBS bahkan harus lebih aktif untuk mengkoordinir melalui koperasi. Swasta atau industri, memaksimalkan bentuk *Corporate Social Responsibility* (CPR) melalui bantuan asset berupa alat yang dapat menambah aktivitas UBS, seperti : alat pencacah sayur untuk pengolahan kompos atau mesin jahit untuk memproduksi berbagai sampah yang dapat digunakan kembali. Begitu juga dengan tiga roda *penta helix* lainnya dapat mengoptimalkan masing-masing peran yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2015. Analisis Pembangunan Wilayah, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Archipelago dan Semeja
- Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research. Published: Oxford University Press
- Denzin, Norman K. dan Lincoln. 2009. *Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif*, dalam Denzin, Norman K. dan Lincoln (ed). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Irianto, Yoyon, et.al. 2010. "Pemasaran Pendidikan", dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Farazmand, Ali. 2004. Globalization and Governance: A Theoretical Analysis. In Farazmand, Ali.ed. 2014. *Sound governance : policy and administrative innovations*. USA: Praeger Publisher.
- Skelcher, Chris, et. al. 2005. The Public Governance of Collaborative spaces: Discourse, Design And Democracy. *Public Administration Journal*. Vol 83, No. 3. USA: Blackwell Publishing Ltd.
- Sulisa, Prasetya Imam Yudhi, Safitri Dian Prima. 2018. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Wilayah Pesisir (Studi Kelurahan Pulau Penyengat). Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media
- Theresia, Aprillia, dan Andini. Krishna, dan Mardikanto, Totok. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Website

<http://haluankepri.com/tanjungpinang/53378-sampah-laut-menumpuk-di-kota-tanjungpinang.html/>

diakses tanggal 21 Mei 2016

<http://batam.tribunnews.com/2014/12/09/atasi-sampah-di-tanjungpinang-pemko-gandeng-universitas-padiajaran/> diakses tanggal 21 Mei 2016

Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat Usia Transisi (Remaja ke Dewasa)

Indriaty Wulansari 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL

INTI SARI

Proses Artikel

Unggah: 04 Juni 2021

Perbaikan: 17 Juni 2021

Diterima: 11 Juni 2021

Tersedia Daring: 30 Juni 2021

Korespondensi

Email: indriaty.wulansari@gmail.com

Fenomena pengendara sepeda motor di bawah umur semakin jamak ditemui di lingkungan kita. Tidak hanya remaja usia SMP atau SMA yang berusia di bawah usia kepemilikan SIM, anak usia SD juga sudah semakin banyak kita jumpai mengendarai sepeda motor. Fenomena ini terlihat bahwa masyarakat sekarang lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum dikarenakan banyak faktor sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Tingkat keselamatan moda ini sangatlah rendah, bahkan disebutkan bahwa sepeda motor merupakan moda transportasi yang paling berbahaya. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat resiko pada pengendara kendaraan bermotor adalah dengan mengatur batas usia pengendara sepeda motor. Penyuluhan ini bertujuan memberikan informasi kepada anak usia transisi (remaja ke dewasa) tentang pentingnya memprioritaskan keselamatan dalam bertransportasi. Dari hasil diskusi dengan peserta penyuluhan, ketidakdisiplinan selalu merupakan alasan utama terjadinya permasalahan transportasi perkotaan. Bagaimana pun baiknya sistem peralulintasan, jika tidak dibarengi dengan disiplin berlalulintas yang baik, akan tetap berakhir dengan masalah. Selain itu, sangat penting ketegasan sistem peralulintasan yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan, penegakan hukum, sosialisasi hukum, sarana, dan prasarana.

Kata Kunci : Keselamatan, Transportasi, Usia Transisi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



PENDAHULUAN

Menurut Kamaluddin (2003), Transportasi darat merupakan suatu transportasi yang terjadi atas dua jenis yakni transportasi jalan raya (*road transport*) dan transportasi jalan rel (*rail transport*). Transportasi jalan raya merupakan suatu alat transportasi yang difungsikan manusia yang terdiri dari binatang, sepeda, sepeda motor, becak, mobil, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Jalan yang difungsikan yang terdiri dari jalan setapak, jalan tanah, jalan kerikil dan jalan aspal. Tenaga penggerak yang digunakan adalah tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga uap, BBM dan diesel. Transportasi jalan rel merupakan alat angkut yang difungsikan berupa kereta api dengan menggunakan rel baja dan digerakkan berupa tenaga uap, diesel, dan tenaga listrik. Pemilihan penggunaan moda transportasi tergantung dan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: a. Segi Pelayanan b. Keandalan dalam bergerak c. Keselamatan dalam perjalanan d. Biaya e. Jarak Tempuh f. Kecepatan Gerak g. Keandalan h. Keperluan i. Fleksibilitas j. Tingkat Populasi k. Penggunaan Bahan Bakar.

Masing-masing moda transportasi menurut Setjowarno (2001), memiliki ciri-ciri yang berlainan, yakni dalam hal: a. Kecepatan, menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak antara dua lokasi b. Tersedianya pelayanan (*availability of service*), menyangkut kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi c. Pengoperasian yang diandalkan (*dependability of*

operation), menunjukkan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan d. Kemampuan (*capability*), merupakan kemampuan untuk dapat menangani segala bentuk dan keperluan akan pengangkutan e. Frekuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan. Secara umum permasalahan transportasi di perkotaan dipengaruhi oleh beberapa kondisi berikut :

- Sarana dan prasarana lalu lintas masih terbatas, berikut masalah yang muncul : Tidak seimbang nya persentase penambahan jumlah kendaraan sebesar 11,47% per tahun dengan persentase penambahan prasarana jaringan jalan yang hanya 4% per tahun, Sarana pejalan kaki (trotoar) belum memadai dan masih sangat kurang, Kapasitas persimpangan masih terbatas serta sarana penyeberangan jalan belum memadai.
- Manajemen lalu lintas belum berfungsi secara optimal, berikut masalah yang muncul; Kendaraan berpenumpang kurang dari 2 orang masih terlalu banyak, Fungsi jalan belum terpisah secara nyata (fungsi jalan arteri masih bercampur dengan fungsi jalan lokal), Jalan dan trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima dan usaha lainnya seperti bengkel, dan parkir liar, Lalu lintas satu arah masih terbatas pada jalan tertentu, Lajur Khusus Bus (LKB) baru diterapkan pada beberapa jalan untuk jam tertentu saja, Penerapan Kawasan Pembatasan Lalu lintas (KPL) masih terbatas pada jam tertentu saja serta sistem kontrol lampu lalu lintas sudah terlalu tua dan tidak memadai dalam kondisi lalu lintas sekarang.
- Pelayanan angkutan umum penumpang belum memadai, berikut masalah yang muncul; Dari sekitar 2 juta kendaraan bermotor, tercatat jumlah angkutan pribadi 86%, angkutan umum 2,51%, dan sisanya sebesar 11,49% adalah angkutan barang. Selain itu, diketahui bahwa 57% perjalanan orang memergunakan angkutan pribadi. Dengan demikian, proporsi angkutan penumpang menjadi tidak seimbang, yaitu 2,51% angkutan umum harus melayani 57% perjalanan orang, sedangkan 86% angkutan pribadi hanya melayani 43% perjalanan orang (Ofyar, 1997).
- Disiplin pemakai jalan masih rendah, berikut masalah yang muncul; Disiplin pengendara, penumpang, maupun pejalan kaki masih kurang, Perubahan peraturan menyebabkan perlunya waktu untuk penyesuaian, Pendidikan mengenai keselamatan lalu lintas belum masuk dalam pendidikan formal.

Dewasa ini fenomena pengendara sepeda motor di bawah umur semakin jamak ditemui di lingkungan kita. Tidak hanya remaja usia SMP atau SMA yang berusia di bawah usia kepemilikan SIM, anak usia SD juga sudah semakin banyak kita jumpai mengendarai sepeda motor. Keprihatinan ini tergambar pada penelitian yang dilakukan di tiga sekolah di Kota Tegal (Kusumastutie, 2018). Hasil penelitian terhadap siswa SMP dan SMA yang berusia di bawah 17 tahun tersebut menunjukkan bahwa 80,3% responden telah dapat mengendarai sepeda motor. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, responden siswa SMP yang telah dapat mengendarai sepeda motor sebanyak 65%, sedangkan responden siswa SMA sebanyak 95%. Selain itu dilaporkan juga bahwa di lingkungan tempat tinggal 50,8% responden terdapat lebih dari 10 orang anak di bawah umur yang telah dapat mengendarai sepeda motor.

Fenomena ini terlihat bahwa masyarakat sekarang lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum dikarenakan banyak faktor sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. tingkat keselamatan moda ini sangatlah rendah. Bahkan disebutkan bahwa sepeda motor merupakan moda transportasi yang paling berbahaya (Shinar, 2017). Penyuluhan ini bertujuan memberikan informasi kepada anak usia transisi (remaja ke dewasa) tentang pentingnya memprioritaskan keselamatan dalam bertransportasi. Sebagian besar pemakai angkutan umum masih mengalami beberapa aspek negatif sistem angkutan umum jalan raya, yaitu tidak adanya jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa terjadinya transfer, kelebihan penumpang pada saat jam sibuk, cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan serta kondisi internal dan eksternal yang buruk (Ofyar, 2008). Dari permasalahan diatas, penulis melihat perlunya penyuluhan kepada generasi muda dalam hal ini yang berada di usia transisi karena perkembangan psikologis lebih

stabil dibanding usia dibawahnya, yaitu kemampuan kontrol diri maupun pembuatan keputusan, disamping sebagai agen perubahan dan penerus Bangsa dan Negara melalui ide, kreatifitas dan karya pengabdian yang dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

Metode Pelaksanaan

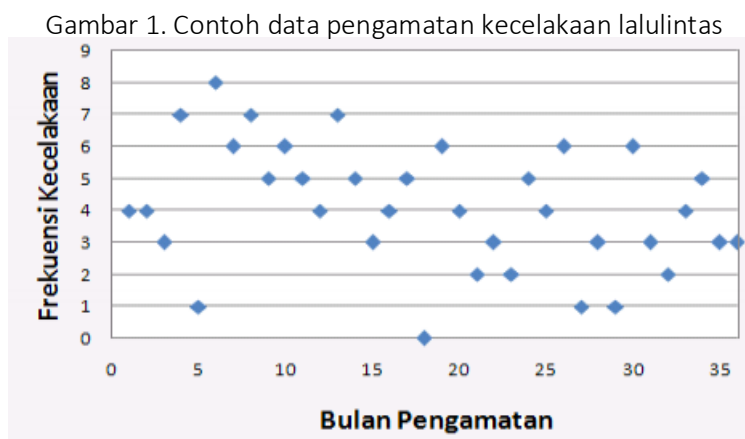
Dalam metode pelaksanaan, diuraikan antara lain: Model penyuluhan masyarakat dalam penyelesaian masalah jalan penghubung lingkungan. Metode penyuluhan yang umum diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Metode ceramah merupakan metode pertemuan yang paling sederhana dan paling sering diselenggarakan untuk menggugah kesadaran dan minat sasaran penyuluhan. Pada metode ini penyuluh lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk menyampaikan tanggapan (Totok Mardikanto, 1993:127)
- b. Metode demonstrasi adalah metode yang paling efektif karena sesuai dengan pepatah "seeing is believing" yang dapat diartikan sebagai "dengan melihat kita menjadi percaya" atau percaya karena melihat". Artinya dalam kegiatan penyuluhan, kepada sasaran penyuluhan perlu ditunjukkan (diragakan) buktibukti yang nyata, yang dapat dengan mata kepala mereka sendiri, agar mereka mempercayai segala sesuatu yang disuluhkan. Bila mereka sudah percaya, maka mereka pasti lebih cepat terdorong untuk mencoba dan menerapkannya.

Dasar-dasar pertimbangan dalam pemilihan metode penyuluhan diantaranya Metode yang digunakan sesuai pola perkembangan masyarakatnya (tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap) dalam hal ini sangat erat hubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat; Metode yang digunakan berdasarkan pendekatan dalam menyajikan materi (apa tujuan dari penyuluhan itu sendiri atau pesan apa yang ingin disampaikan); Metode yang disesuaikan waktu atau saat yang tepat bagi sasaran, dan Metode yang digunakan disesuaikan alat bantu yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kementerian PUPR (2016), Pada hakikatnya kecelakaan lalu lintas diawali suatu konflik potensial terhadap kecelakaan atau kondisi berbahaya (*unsafe condition*) ketika kumpulan berbagai hazard sudah tidak diindahkan oleh semua pihak. Sebagian besar arus lalu lintas merupakan lalu lintas yang tidak terganggu dalam arti semua konflik terkendali dengan baik, tetapi semakin tinggi peluang konflik semakin besar potensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini akan diperparah apabila perilaku dan disiplin berlalu lintas yang tidak benar.



Pada kondisi itu, terjadi banyak peristiwa yang mendekati kecelakaan (*near accident*). Kecelakaan lalu lintas akan terjadi apabila konflik atau hazard melewati sistem batas pengendalian (*system boundary*) yang kemudian mengubah hazard menjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan berfluktuasi dari waktu ke waktu tetapi memiliki kecenderungan penyebaran data. Contoh: suatu data dari pengamatan selama 36 bulan menghasilkan sebaran kecelakaan lalu lintas seperti terlihat pada gambar 1. Salah satu tujuan analisis keselamatan lalu lintas adalah memperkirakan perubahan tingkat keselamatan sebagai konsekuensi pengembangan infrastruktur ataupun implementasi program penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Gede (2014), Negara harus memastikan jalan yang berkeselamatan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 206 : Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a. Audit; b. Inspeksi; dan c. Pengamatan dan pemantauan. Menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 22 : Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif , Uji Laik fungsi jalan dilaksanakan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan (terdiri dari unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia). Berikut contoh kondisi jalan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh instansi terkait disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kondisi eksisting dan rekomendasi yang diharapkan

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
 <p data-bbox="389 1193 679 1249">Terdapat lajur yang menyatu Marka memudar</p>	 <p data-bbox="778 1193 1150 1272">Perlu penambahan rambu persimpangan tiga serong kiri serta penambahan marka yang memadai</p>
 <p data-bbox="389 1529 735 1641">Terdapat RPPJ yang terhalang oleh pepohonan dan tidak terdapat guard rail yang dilengkapi delineator pada sisi kanan jalan</p>	 <p data-bbox="778 1529 1141 1664">Hambatan yang mengganggu visualisasi RPPJ perlu dibersihkan, perlu delineator pada guard rail dan perlu pemasangan guardrail yang dilengkapi deliniator</p>

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat resiko pada pengendara kendaraan bermotor adalah dengan mengatur batas usia pengendara sepeda motor. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa batas minimal usia kepemilikan SIM A dan C adalah 17 tahun. Pembatasan umur ini terkait dengan kematangan perkembangan psikologis individu, yaitu kemampuan kontrol diri maupun pembuatan keputusan, disamping juga terkait dengan kebutuhan akan pendidikan lalulintas (Fatonah dkk, 2018). Hal ini akan terkait dengan kemampuan berkendara yang berkeselamatan. Adapun tujuan dari penyuluhan ini dari sisi akademisi adalah memberikan pemahaman terkait keselamatan transportasi khususnya di darat khususnya untuk usia transisi (remaja – dewasa). Para peserta

sangat antusias mengikuti pemaparan, terlihat dengan banyaknya pendapat, pertanyaan dan saran yang dikemukakan. Berikut dokumentasi penyuluhan akan disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Dokumentasi penyuluhan



Kesimpulan

Ketidaksiplinan selalu merupakan alasan utama terjadinya permasalahan transportasi perkotaan. Bagaimana pun baiknya sistem peralulintasan, jika tidak dibarengi dengan disiplin berlalulintas yang baik, akan tetap berakhir dengan masalah. Selain itu, disiplin tidaknya pengguna jalan tidak saja tergantung pada dirinya sendiri, tetapi juga pada ketegasan sistem peralulintasan yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan, penegakan hukum, sosialisasi hukum, sarana, dan prasarana. Penegakan hukum berperan sangat penting. Undang-undang beserta perangkat peraturan pelaksanaannya perlu disebarluaskan agar masyarakat dapat memahaminya, termasuk penjelasan sanksi pelanggarannya. Target penyuluhan ini diharapkan dapat dipahami oleh peserta yang usianya beranjak dewasa dan sudah mulai matang dalam berfikir dan bertindak sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Fatonah, S. R., and D. Nurdibyanandaru. "Peran Oran Tua yang Memiliki Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 7 (2018): 67-79.
- Fatonah (2018). Peran Oran Tua yang Memiliki Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 7, 67–79.
- Gede. (2014). Keselamatan Transportasi Darat, disampaikan dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kamaluddin (2003). *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Kementerian PUPR. (2016). *Pemantauan dan Evaluasi Jalan Berkeselamatan*. Diklat Jalan Berkeselamatan. Modul 11.
- Kusumastutie, N. S. (2018). Perilaku Berkendara Sepeda Motor pada Remaja Berusia di Bawah 17 tahun. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 5(2), 1-18.
- Tamin, O. Z. (1997). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, ITB.
- Tamin, O. Z. (2008). *Perencanaan, Pemodelan dan Rekayasa Transportasi*. Bandung: ITB, 277.
- Setjowarno. 2001. *Pengantar Sistem Transportasi*. Edisi Pertama, Semarang: Penerbit Universitas katolik Soegijapranata
- Shinar, D. (Ed.). (2017). *Traffic safety and human behavior*. Emerald Group Publishing.
- Mardikanto, T. (1993). *Metode penyuluhan*. Surakarta : UNS
- Undang – Undang No. 22. 2009. Undang-undang (UU) tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 13 HLM

Strategi Social Mapping di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintan

Aspariyana Aspariyana 

Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

INFO ARTIKEL	INTI SARI
<p>Proses Artikel</p> <p>Unggah: 10 Juni 2021 Perbaikan: 22 Juni 2021 Diterima: 27 Juni 2021 Tersedia Daring: 30 Juni 2021</p> <p>Korespondensi Email: riyanaaspa@gmail.com</p>	<p>Pemetaan sosial (social mapping) merupakan upaya mengidentifikasi dan berusaha memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu. Pemetaan sosial dapat juga diartikan Identifikasi kelembagaan dan individu ini dilakukan secara akademik melalui suatu penelitian lapangan, yakni mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikan dan menetapkan tata hubungan antara satu dengan lain satuan social dalam Kawasan yang akan di teliti. Pemetaan sosial ini hanya dikhususkan pada salah satu desa di Teluk Bintang yakni Desa Bintang Buyu Kampung Bintang Bekapur. Metode dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa pemetaan sosial di Desa Bintang Buyu merupakan kawasan ekowisata yang memenuhi syarat dari sektor ekonomi, sosial, budaya, agama serta politik. Selain itu sosial mapping di desa tersebut memiliki kondisi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi, hal ini terbukti banyaknya kunjungan dalamkegiatan masyarakat berupa event-event besar yang ada di Desa Bintang Buyu, Kabupaten Bintan</p>

Kata Kunci : Sosial Mapping, Desa, Bintang Buyu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



Pendahuluan

Pemetaan sosial (social mapping) didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau “pembuatan profile suatu masyarakat”. Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat yang oleh Twelvetrees (1991:1) didefinisikan sebagai “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ilmu penelitian sosial dan geography. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa suatu peta wilayah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosial, misalnya jumlah orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar, yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya.

Perlu dicatat bahwa tidak ada aturan dan bahkan metoda tunggal yang secara sistematis dianggap paling unggul dalam melakukan pemetaan sosial. Prinsip utama bagi para praktisi pekerjaan sosial dalam melakukan pemetaan sosial adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan sebagai bahan membuat suatu keputusan

terbaik dalam proses pertolongannya. Mengacu pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993:68) ada tiga alasan utama mengapa para praktisi pekerjaan sosial memerlukan sebuah pendekatan sistematis dalam melakukan pemetaan sosial:

1. Pandangan mengenai “manusia dalam lingkungannya” (the person-in-environment) merupakan faktor penting dalam praktek pekerjaan sosial, khususnya dalam praktek tingkat makro atau praktek pengembangan masyarakat. Masyarakat dimana seseorang tinggal sangat penting dalam menggambarkan siapa gerangan dia, masalah apa yang dihadapinya, serta sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Pengembangan masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh masyarakat tersebut.
2. Pengembangan masyarakat memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini, para praktisi akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan sosial maupun dalam memelihara keamanan dan mengupayakan perubahan.
3. Masyarakat secara konstan berubah. Individu-individu dan kelompok-kelompok bergerak kedalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan penduduk. Pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut.

Saat ini peranan budaya dan adat istiadat tidak sekuat dahulu, sehingga semakin lama semakin menipis dan melemah, tidak dipungkiri peran pemerintah kurang mensosialisasinya betapa pentingnya melestarikan budaya hingga etika dan perilaku orang melayu akibatnya banyak sudah unsur westernisasi yang masuk ke dalam masyarakat yang menghantam generasi muda. Indikasi yang banyak muncul salah satunya ialah fenomena pergaulan bebas. Jika dahulu saya melihat anak muda orang melayu sangat sopan-santun dan mengetahui apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan, sehingga budaya melayu yang sesungguhnya yang harus dipetik di Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan

Metode

Adapun metode yang digunakan adalah Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods). Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis dan sosial-ekonomi. Metode Pemantauan Cepat meliputi Pengamatan Langsung (Direct Observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dll.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan sosial (social mapping) merupakan upaya mengidentifikasi dan berusaha memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu. Pemetaan sosial dapat juga diartikan Identifikasi kelembagaan dan individu ini dilakukan secara akademik melalui suatu penelitian lapangan, yakni mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikan dan menetapkan tata hubungan antara satu dengan lain satuan social dalam Kawasan yang akan di teliti. Pemetaan sosial ini hanya dikhususkan pada salah satu desa di Teluk Bintan yakni Desa Bintan Buyu Kampung Bintan Bekapur. Dimana di kampung ini terdapat 3 Rukun Tetangga (RT) yaitu, RT XI RT XII dan XIII kawasan ini berada di lingkungan Rukun Warga (RW) yakni VI. Secara geografis Kampung Bintan Bekapur berada di Desa Bintan Buyu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Dengan luas desa +- 49,2 Km. Selain itu Bintan Buyu menjadi pengembang di sektor pertanian dan perkebunan. Adapun desa bintan Buyu memiliki batas-batas yang dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 1.1. Batasan Desa Bintan Buyu Kampung Bintan Bekapur

No	Batasan	Wilayah
1	Utara	Desa Sri Bintan
2	Timur	Desa Toapaya Utara
3	Selatan	Desa Tembeling
4	Barat	Desa Penaga

Sumber : Data Olahan

Iklm didesa Bintan Buyu memiliki 3 iklim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai bulan Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan september hingga bulan februari. Desa Bintan Bekapur dulunya disebut juga dengan Kota Kara karena dalam sejarahnya didesa tersebut terdapat sebuah kota tua masa lampau. Lalu, masyarakat setempat mulai membuka lahan perkebunan untuk menopang perekonomian masyarakat setempat. Akhirnya Kota Kara berganti nama menjadi Desa Bintan Bekapur. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat setempat mayoritas yakni berdagang hasil kebun. Buah-buahan musiman yang diperdagangkan berupa buah durian, duku, manggis, petai, jengkol dll. Meskipun masyarakat disini termasuk pedagang musiman namun setelah habis masa panen masyarakat disini mulai berkerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hal ini dapat di lihat masih banyaknya tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

Gambar 1. Tugu Durian Kampung Bintan Bekapur



Sumber : Penulis, 2021

Akses ke lokasi Desa Bintan Buyu sangat mudah dijangkau, didukung dengan kondisi jalan yang suda mulus hingga sepanjang desa. Waktu tempuh dari pusat Kota Tanjungpinang hingga menuju ke Kampung Bintan Bekapur membutuhkan waktu kira-kira 35 menit. Desa Bintan Buyu dikenal kaya akan SDA yang asri, disepanjang jalan kampung kita disajikan oleh hamparan pohon-pohon durian yang tinggi menjulang. Kampung ini juga memiliki beberapa spot wisata mulai dari tempat wisata hingga wisata kuliner ada disini, adapun uraiannya potensi wisata dilihat dari tabel dibawah ini.

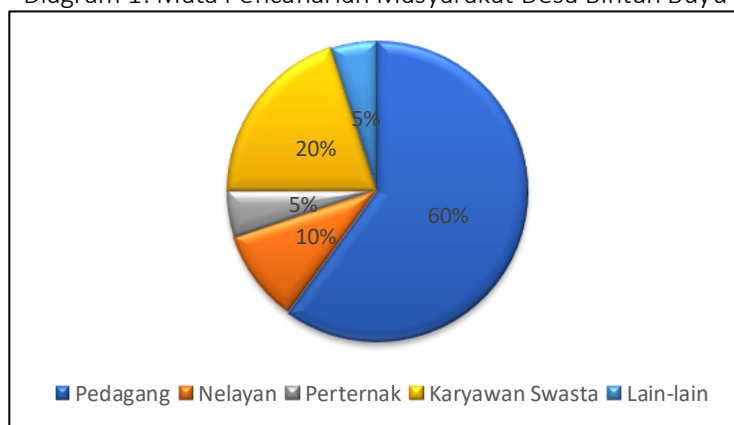
Tabel 1.4 Potensi di Desa Bintan Buyu

No	Jenis Wisata	Potensi
1	Wisata Alam	Gunung Bintang sebagai salah satu spot wisata yang terkenal sejak dulu. Gunung ini terletak tepat di Kampung Bintang Bekapur. Disana juga terdapat air terjun serta mata air yang sejuk. Biasanya para wisatawan yang mengunjungi air terjun juga mengambil kesempatan untuk berenang menikmati air gunung. Saat ini yang mengolah tempat wisata air terjun yakni dari BUMDES dan dibantu oleh pemuda Bintang Bekapur. Tempat ini masih sangat tradisional karena belum tersentuh oleh pihak swasta.
2	Wisata Kuliner	Buah Durian atau disebut juga raja buah menjadi salah satu buah yang sangat terkenal. Apalagi Bintang juga sebagai salah satu perkebunan durian besar di Kota Tanjungpinang. Khususnya di Bintang Bekapur sendiri dikenal orang sebagai surganya wisata kuliner berupa buah Durian. Selanjutnya setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bintang selalu mengadakan pesta durian yang bertempat di Kampung Bintang Bekapur ini.
3	Wisata Religi	Makam peninggalan kerajaan Bintang, disini cukup banyak ditemukan makam dari kerajaan Bintang. Salah satunya makam raja nam-nam yang terdapat dalam cerita legendaris Hang Tuah. Makam ini terletak di atas Gunung Bintang, membutuhkan waktu kira-kira 20 menit dari tugu durian menuju tempat tersebut.

Sumber: Data Olahan

Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi (Mulyadi, 1993). Kajian mata pencaharian menjelaskan dominasi pelaku usaha perdagangan. Hal ini didapat dari hasil interview beberapa pelaku usaha yang berasal dari masyarakat setempat.

Diagram 1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bintang Buyu



Sumber: Data Olahan, 2021

Dilihat dari diagram venn diatas, mayoritas mata pencaharian warga Kampung Bintang Bekapur sebagai pedagang sejumlah 60 persen, Selain itu karyawan swasta berjumlah 20 persen, lalu nelayan, perternak sebanyak 10 persen. Identifikasi Kebudayaan yang terbentuk dari gabungan kebudayaan lokal yang ada diindonesia yang menjadi satu dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat yang ada diindonesia. Dikarenakan adanya rasa kesamaan, dan saling toleransi atau semacamnya. Desa Bintang Buyu memiliki Identifikasi Kebudayaan sebagai berikut

a. Kenduri Durian; Hal ini dilakukan pada saat setiap panen durian. Masyarakat lalu menyuguhkan

beberapa buah durian diatas nampan lalu dilakukan pengajian secara melingkar. Namun ada keunikan tersendiri yakni disela-sela pengajian, pembaca doa membakar kemenyan sebagai sarana berdoa kepada Tuhan YME.

- b. Hajatan Keselamatan; Pada saat kenduri selamatan atau arwah masyarakat mengadakan pengajian namun berbeda dengan daerah-daerah lain. Masyarakat disini dapat dikatakan tradisional dengan masih menggunakan tradisi melayu tempo dulu yakni makan dengan menggunakan nampan besar, diatas nampan tersebut diletakkan beberapa lauk dan kue tradisional, selanjutnya satu nampan dihabiskan oleh max 4 orang.

Konteks tersebut di lihat akibat modernisasi perilaku terhadap kebudayaan di Indonesia yang sekarang hanya dipegang lalu dilestarikan dan diimani oleh kalangan orang tua saja dan generasi muda hampir tidak ada upaya dalam melestarikan budaya tersebut dari hal yang terkeci (Aspariyana, 2018). Kondisi psikologi masyarakat Desa Bintan Buyu adalah Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bintan Bekapur mayoritas beragama Islam. Beberapa kegiatan keagamaan cukup sering dilakukan yaitu yasinan, pengajian. Selain itu terdapat TPQ sebagai tempat belajar Alquran bagi anak-anak Kampung Bintan Bekapur yang setiap Hari Selasa, Rabu dan Kamis melakukan aktivitas mengaji. Kondisi sarana dan fasilitas ibadah agama Islam yang dimiliki sudah baik.

Kesimpulan

Desa Bintan Buyu merupakan desa yang masih terjaga akan kultur dan budaya, selain itu kondisi ekonomi dan sosial menggunakan pemberdayaan masyarakat dengan menjaga tradisi dari dulu hingga sekarang, namun aktivitas Desa Bintan Buyu belum ada modernisasi sehingga masyarakat di luar Desa Bintan Buyu masih menikmati suasana Desa yang sesungguhnya. Desa Bintan Buyu mempunyai ragam dan potensi yang bisa dieksplorasi secara baik sehingga bisa memberikan nilai kepada masyarakat dan lingkungannya. Namun Desa Bintan Buyu perlu memperkuat beberapa program desa. Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa, sehingga Pemberdayaan masyarakat Desa Bintan Buyu upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aspariyana, A. (2018). Dampak Modernisasi Perilaku terhadap Budaya. Teraju Umrah.
- Gallagher, M. (2009). Data collection and analysis. *Researching with children and young people: Research design, methods and analysis*, 65-127.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtry (1993), *Social Work Macro Practice*, New York: Longman.
- Prennushi, G., Rubio, G., & Subbarao, K. (2002). Monitoring and evaluation. *A sourcebook for poverty reduction strategies*, 107-30.
- Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. *Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)*.
- Suharto, E. (2002). Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Bandung: A Study of Pedagang Kakilima. *Disertasi, Palmerston North: Massey University*.
- Twelvetrees, A. (1991). *Community development, social action and social planning*. Macmillan International Higher Education.

Warren, R. L. (1963). *The community in America* (No. HT123 Undang – Undang No. 22. 2009. Undang-undang (UU) tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 HLM

Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Daerah; Studi di Pulau Penyengat

Fedro Saputra 

Program Sosiologi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL)

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Unggah: 10 Juni 2021

Perbaikan: 22 Juni 2021

Diterima: 27 Juni 2021

Tersedia Daring: 30 Juni 2021

Korespondensi

Email: fedrosaputra@gmail.com

INTI SARI

Pembangunan sosial merupakan bagian strategi dalam mengerakan partisipasi masyarakat agar pada sektor pembangunan yang berkelanjutan bisa memiliki peran dengan hadinya masyarakat paritisipasif. Tulisan ini menjelaskan kondisi kekinian yang terjadi dipulau penyengat sebagai wilayah yang strategis dalam menjaga kehidupan sosial menjadi lebih baik. Jenis pengabdian masyarakat menggunakan metode pendekatan dialog face to face, Observation dan Win-Win Solusion yang kemudian penulis intrepasikan dengan kata-kata yang diuraikan secara deskriptif, deskriptif yang dimaksud sebagai rangkai penjelasan atas hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Hasil pengabdian memberikan bentuk partisipasif berbasis inovasi pembangunan sosial dimana inovasi tersebut merupakan rangkaian dari masyarakat yang ada di Pulau Penyengat Tanjungpinang. Selain itu untuk mendukungnya strategi inovasi pembangunan sosial, perlunya peningkatan kuliatas sumberdaya manusia atau masyarakat bisa berperan aktif dari lima sektor (linfraksturktur, kesehatan, budaya, sosial dan lingkungan) yang menjadi fokus utama dalam mendorong inovasi pembangunan sosial berbasis masyarakat. Diharapkan dengan adanya strategi inovasi pembangunan sosial tersebut dapat meningkatkan kemandirian masyarakat pulau penyengat dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mendapatkan dampak positif yang telah di implementasikan sebagai rujukan inovasi pembangunan sosial di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Startegi, Pembangunan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pulau Penyengat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



PENDAHULUAN

Pengembangan partisipasif pembangunan sosial memproyeksi antara hubungan masyarakat Baik secara kelompok maupun secara individu yang mementingkan kondisi lingkungan agar berperan aktif memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah (Kelly & Westoby, 2018), hal Hal ini menunjukkan bahwasanya pentingnya intervensi partisipasi masyarakat sebagai bentuk strategi dalam mengekspor masalah-masalah pembangunan sosial yang lebih efektif dan ideal dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (Belaid et al, 2021). Partisipatif memiliki potensi untuk menghasilkan nilai sosial yang cukup besar di masyarakat setempat. Salah satu manfaat sosial penting pengembangan pembangunan sosial. Namun, sedikit yang diketahui tentang perkembangan dan hasil pembangunan sosial dalam konteks bermasyarakat. paritisipatif pembangunan sosial sejatinya mempunyai ikatan kebersamaan yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ada jalinan antara penghubung dan menghubungkan sehingga terciptanya dampak yang positif, mulai dari sikap dan perilaku yang mendukung, pengaruh positif pada orang lain, perilaku prososial, dan peningkatan sosialisasi sehari-hari (Anna, 2019).

Dengan menghasilkan hasil positif di antara kelompok masyarakat tersebut dalam pembangunan sosial, maka potensi untuk berkontribusi pada pengembangan pembangunan sosial memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat (Zhou & Kaplanidou, 2018). Selain itu Menggali konsep partisipasif pembangunan sosial bersama masyarakat tempatan merupakan logika logis untuk mendorong implementasi konsep partisipasif pembangunan sosial secara bersama. konsep partisipasif hadir dengan adanya kolaborasi dari teori Marxis asal usul rekayasa sosial sehingga terjadinya partisipasif pembangunan sosial, Ide, implementasi pada partisipasif pembangunan sosial memberikan panduan proses untuk praktik konsep pembangunan bersama (Cao & Zhang, 2019). Namun untuk mengukur dan memantau implementasi konsep partisipasif pembangunan sosial secara berkelanjutan merupakan aspek penting yang harus difungsikan sesuai dengan penempatannya, misalkan sebuah proses partisipasif di tunjukan dengan adanya kehidupan yang memiliki tingkatan dilingkungannya sendiri serta interaksi yang ditunjukkan dengan aksi nyata (Barska et al, 2020).

Akan tetapi ancaman pada pembangunan sosial secara global yang dapat dievaluasi dan didefinisikan sebagai proses, fenomena, dan situasi berbahaya yang membahayakan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kehidupan seluruh umat manusia, dan memerlukan penghapusan ketika terjadi kesenjangan. Risiko pada pembangunan sosial ini didefinisikan sebagai peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan efek negatif yang signifikan bagi beberapa dari kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan secara besar-besaran sehingga tidak terkontrol secara kontekstualnya (Jones & Truell, 2012; Siau & Long, 2006). Masalah-masalah tersebut didefinisikan sebagai fenomena pada situasi yang tidak sepenuhnya dapat dipahami, menarik, aktual, memerlukan pemecahan dan pengaturan, serta tidak memiliki solusi yang terpadu (Sardak et al, 2017).

Merujuk pada partisipasif masyarakat merupakan bagian merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Pembangunan sosial adalah sebuah proses perubahan sosial yang terencana dan didesain dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Namun pada awal berkembangnya kegiatan ini, pembangunan sosial sering dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi, namun seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial serta pembangunan fisik semakin diterima. Pembangunan secara sosial ini merupakan hal yang sesuai untuk diterapkan dalam negara yang berkembang (Puspitasari, 2016; Huruswati, 2015). Partisipasif masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Pentingnya partisipasif masyarakat dalam suatu program pembangunan karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan (Maryani & Nainggolan, 2019).

Kemudian dari pada itu konteks pengabdian masyarakat atau kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, dimana kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan beberapa uraian diatas bahwasannya strategi partisipasi pembangunan sosial harus fokus terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Pulau Penyengat sebagai bentuk mengidentifikasi serta bertujuan untuk memberikan solusi pada potensi-potensi partisipasi pembangunan sosial dalam konteks bermasyarakat, pentingnya pengabdian masyarakat ini sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat kehidupan sosial di mana kehidupan sosial itu harus diperkuat melalui interaksi dalam bentuk pengabdian masyarakat.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang yang di laksanakan pada tanggal 16-22 Mei 2021. Tim pengabdian masyarakat memilih lokasi tersebut dikarenakan letak yang strategis di pusat ibukota provinsi serta menjadi letak yang strategi di kawasan pesisir yang menjadi jalur transportasi laut dalam negeri maupun luar negeri. Metode pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk observasi serta melakukan Analisa terhadap kondisi di Pulau Penyengat dengan memperhatikan bentuk identifikasi permasalahan dalam rangka menguraikan semua sector dalam partisipasi pembangunan sosial, kemudian kami melakukan serangkaian dokumentasi serta melakukan diskusi yang dintrepetasikan sebuah solusi yang relevan. Identifikasi yang dimaksud bisa dilakukan dalam beberapa bentuk metode-metode yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Metode Pengabdian Masyarakat

Metode	Bentuk Pengabdian	Solusi yang relevan
<i>Dialog Face-to Face</i>	Melakukan diskusi non formal pada individu yang memiliki peran penting pada pembangunan sosial	Partisipasi aktif yang berkelanjutan pada pengembangan pembangunan sosial
<i>Observation</i>	Melakukan peninjauan pada potensi-potensi sebagai faktor pendukung yaitu SDM dan SDA	Inovasi Pengembangan pembangunan sosial
<i>Win-Win Solution</i>	Melakukan Analisa logika secara mendalam dilapangan pada pembangunan sosial	Implementasi pada potensi pembangunan sosial

Sumber : Olahan Peneliti, (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pulau Penyengat

Pulau Penyengat atau Pulau Penyengat Inderasakti dalam sebutan sumber - sumber sejarah adalah sebuah pulau kecil di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari pusat Kota Tanjungpinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang diantaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam - makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks Istana Kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Sejak tanggal 19 Oktober 1995, Pulau penyengat dan kompleks istana di Pulau Penyengat telah dicalonkan ke UNESCO untuk dijadikan salah satu Situs Warisan Dunia.

Pulau penyengat dengan sederet lintas sejarah yang dimiliki ternyata dapat mempengaruhi mulai dari prilaku masyarakat setempat, agenda sosial yang berjalan ditempat tersebut, kemudia model dan bentuk pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Maka berdasarkan perjalanan sejarah yang dulunya hanya tempat persinggahan para lanon untuk memenuhi stok air di kapal, kemudian karena tempatnya yang strategis sehingga dapat menjadi pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga yang lambat laun menjadi pusat agama serta budaya hingga sekarang menjadi destinasi wisata budaya dan wisata rohani, Sebagian hal yang mendorong para visitor/pengunjung datang kesana ialah karena peninggalan bangunan sejarah mulai dari bangunan infrastruktur peninggalan kerajaan Riau Lingga, kemudian beberapa makam raja-raja yang sempat berkuasa serta ada beberapa karya sastra yang di warisi dan sampai sekarang masih dikenal serta tetap menjadi pedoman kehidupan masyarakat setempat meskipun untuk zaman global ini pengaruh yang begitu kuat, kemudia yang lebih terkenal ialah adanya mesjid peninggalan sejarah serta al-qur'an tulis tangan.

Gambar 1. Tangkapan Layar *Maps* Pulau Penyengat



Sumber : Google Maps, 2021.

Pulau penyengat merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu, yang sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak dan Lingga, khususnya di bagian selatan dari Semenanjung Melayu. Peran penting tersebut berlangsung selama 120 tahun, sejak berdirinya Kerajaan Riau di tahun 1722, sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada 1911. Perang Saudara tahta Johor. Awalnya pulau ini hanya sebuah tempat persinggahan armada-armada pelayaran yang melayari perairan Pulau Bintan Selat Malaka dan sekitarnya. Namun pada tahun 1719 ketika meletus perang saudara memperebutkan tahta Kesultanan Johor antara keturunan Sultan Mahmud Syah yang dipimpin putranya Raja Kecil melawan keturunan Sultan Abdul Jalil Riyatsyah yang dipimpin Tengku Sulaiman.

Patisipasif Pembangunan Sosial di Pulau Penyengat

Masalah sosial dapat terjadi dimanapun dikota - kota besar bahkan sampai desa terpencil sekalipun. Membahas permasalahan sosial di pulau-pulau kecil di Indonesia seharusnya tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang kebijakan pengelolaan sektoral ataupun kebijakan teknis yang dikeluarkan. Analisa permasalahannya harus juga dilihat kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh kementerian teknis lain ataupun kebijakan general yang ada pada beberapa Undang yang ada di Republik ini. Undang- Jika pulau terpencil di Indonesia memiliki potensi wisata yang apik, maka hanya tinggal menunggu waktu daerah terpencil tersebut akan meningkat karena faktor sosial budaya, kekayaan sumber daya alam, maupun potensi wisatanya. Namun jika wilayah kawasan perbatasan berada dalam kondisi yang miskin, terbelakang, minim sumber daya maka sekerumit permasalahan pun akan menggunung. Menciptakan duka dan derita yang luput dari perhatian para pemangku kepentingan di Ibukota. Pulau Penyengat merupakan salah satu pulau yang ada di Tanjungpinang. Pulau ini menjadi salah satu kebanggaan Tanjungpinang karena kaya situs bersejarah peninggalan Kerajaan Riau. Pulau Penyengat memiliki beberapa permasalahan permasalahan sosial. Berikut adalah beberapa masalah sosial yang terjadi di Pulau Penyengat yang kami ketahui selama melakukan pengabdian masyarakat.

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga swasta dan masyarakat. Negara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan harus memiliki semangat kerja keras dan dedikasi tinggi dalam semangat pengabdian, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dengan sikap jujur, integritas dan penuh keteladanan dalam membangun pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang memberikan manfaat itupun dapat di berjalan dengan sesuai dan merata sehingga terciptalah kualitas masyarakat yang baik mampu bersaing dan sejajar dengan bangsa lain

Bagi orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan

kita sampai saat ini masih minim. Dunia pendidikan yang minim ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia yang lebih berilmu dan berpengetahuan, tetapi dalam kenyataannya sering kali tidak begitu. Sering kali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka telah memberikan hasil yang cukup mengagumkan sehingga secara umum kualitas sumber daya manusia Indonesia jauh lebih baik. Namun dibandingkan dengan daerah lain, seperti Pulau Penyengat masih ketinggalan jauh. Alhasil masyarakat Pulau Penyengat menjadi orang yang tertutup terhadap para pendatang akibat keterbatasan pengetahuan dan sisi sudut pandang yang minim terhadap orang luar.

Oleh karena itu upaya yang lebih aktif seperti upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang relatif ringan. Hal ini disebabkan dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pendidikan di Pulau Penyengat cukup memprihatinkan dikarenakan minimnya guru di daerah tersebut serta anak-anak yang seharusnya sekolah kini membantu orang tuanya dan tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Pendidikan yang ada di Pulau Penyengat sangatlah terbatas, banyaknya anak di Pulau Penyengat yang harus sekolah di Tanjungpinang dengan mengguankan pompong yang jarak tempuh sekitar 15 menit. Dimana resiko yang mereka hadapi begitu besar ketika cuaca yang tidak bersahabat dan disertai ombak yang cukup besar.

2. Kesehatan

Faktanya dilapangan banyak dijumpai berbagai kejanggalan dalam memperoleh akses kesehatan yang semestinya. Kemiskinan mungkin sulit dihapus dari muka bumi ini. Ini menjadi salah satu permasalahan besar yang tengah dihadapi Tanjungpinang serta penduduk Pulau Penyengat yang punya penduduk miskin yang jumlahnya cukup besar. Pelayanan rumah sakit yang hangat dan tulus sangat dibutuhkan warga kecil untuk menikmati kesehatan. Letak Pulau Penyengat yang dikelilingi laut sehingga harus ada angkutan laut yang dilengkapi peralatan medis untuk membawa yang gawat darurat. Letak Pulau Penyengat yang terpisah dengan sampai ke rumah pasien. Tanjungpinang (laut) sehingga ambulan tidak bisa mengantar langsung. Dalam hasil pengabdian di Pulau Penyengat, banyak masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dimana kurangnya pelayanan kesehatan disana karena dokter yang ditugaskan disana tidak menetap di Pulau Penyengat, jadi apabila masyarakat mau berobat sering tidak ada dokternya dikarenakan dokternya sering keluar kota. Minimnya fasilitas kesehatan yang disediakan juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi.

Harus adanya angkutan Jaut yang dilengkapi alat-alat medis untuk warga yang terdapat di penyengat. Semua warga akan kesusahan ketika salah satu penyakit kronis dan harus secepatnya mendapat keluarganya yang menderita pertolongan medis tetapi di penyengat transportasi laut untuk menangani masalah kesehatan belum ada. Hal ini juga seharusnya merupakan hal yang harus diperhatikan bagi pemerintah. Jika hal tersebut dibiarkan cukup lama , lama kelamaan warga akan berpindah tempat tinggal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat memadai bagi diri sendiri dan juga bagi keluarga mereka. Seperti contohnya jika ada warga yang tiba-tiba sakit jantung dan harus di bawak ke UGD sedangkan mau membawa ke pulau sebrang transportasi tidak memadai ditakutkan nyawa warga tidak bisa diselamatkan dengan secepatnya.

Pelayanan kesehatan untuk hal warga yang ada di penyengat belum berjalan dengan sangat maksimal. Dari mulai belum adanya posyandu untuk para lansia-lansia , angkutan laut yang dilengkapi dengan alat-alat medis untuk para warga serta ambulan laut untuk mengangkat pasien yang baru pulang ataupun mau pergi berobat ke tanjung pinang sungguh itu sangat sulit untuk para warga mengangkat pasien untuk menuju ke rumahnya ataupun ke rumah sakit. Dan jika tidak tersedia angkutan laut takutnya penanganan untuk pasien terlambat,Sedangkan jika ada warga yang keluarganya meninggal dunia di tempat lain sedangkan mau dibawa pulang ke penyengat sedangkan tidak tersedia ambulan , hal tersebut juga akan menjadi suatu masalah bagi setiap warga.

3. Pengelolaan sampah

Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang, kelestarian serta keindahan Pulau Penyengat berikut segala macam potensi wisata yang ada, dimana tentulah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat. Upaya - upaya kreatif dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke pulau tersebut tidak boleh terhenti. Dibalik itu, pemerintah daerah juga harus tegas dalam aturan demi memelihara kekayaan alamnya. Bagian kecil namun kerap terlupakan adalah masalah sampah. Pasalnya, sampah terlihat berserakan di tempat - tempat umum, seperti di pelabuhan, di kompleks bangunan bersejarah, dan di jalan - jalan yang menjadi lintasan wisatawan. Sangat tidak lazim jika sebuah tempat wisata tidak terjaga kebersihannya.

Minimnya ketersediaan tempat sampah itu pula yang membuat pengunjung tidak jarang membuang sampah di laut. Dengan kata lain, semakin banyak pengunjung, semakin banyak sampah yang dibuang sembarangan, dan laut pun tercemar. Masyarakat di Kelurahan Penyengat meminta pemerintah kota maupun provinsi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kampung mereka. Menurut warga sudah ada lahan kosong yang berada di Kampung Bulang dan Pulau Penyengat. Hal ini disampaikan masyarakat dalam acara Musrenbang Kelurahan Penyengat yang dilaksanakan di Balai Kelurahan. Selain sampah di Pulau penyengat, faktor lainnya adalah arus perairan yang membawa sampah dari hulu ke hilir sehingga sampah berlabuh di pulau penyengat. Perlunya fasilitas untuk memfilteralisasi sampah-sampah binaan dari laut tersebut agar tidak merusak pemandangan ketika ada kunjungan dari masyarakat diluar pulau penyengat untuk menikmati wisata berbasis kebudayaan.

Gambar 2. Sampah bawaan laut di Pulau Penyengat



Sumber : Data Sekunder, (2021).

4. Infrastruktur

Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata yang disiapkan sebagai situs warisan budaya dunia. Banyak menyimpan sejarah yang kaya seni dan budaya. Salah satu destinasi pariwisata di Tanjungpinang ini sangat minim pengelolaan khususnya fasilitas pendukung di sektor pariwisata. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan sarana dan prasarana Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat harus dibenahi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad terus menegaskan agar terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat salah satunya terpenuhinya kelistrikan di pulau pulau. Listrik yang optimal akan membuat produktivitas masyarakat semakin tinggi dan membantu meningkatkan sektor pendidikan. Karena itu, Nurdin memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau untuk melakukan pemetaan pulau pulau serta desa-desa agar segera terealisasi. Secara perlahan- lahan kawasan tersebut harus dialiri listrik. Ansar Ahmad menyadari, dalam rangkaian kunjungan ke berbagai

daerah di Kepulauan Riau, terutama pulau - pulau, keluhan utama masyarakat adalah soal pasokan listrik. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik menjadi salah satu yang ingin dituntaskan Gubernur Ansar.

Ansar menyebutkan, jika di pulau-pulau hanya dibantu genset, ada kemungkinan masyarakat nanti akan kesulitan kedepannya. Terutama untuk pasokan bahan bakarnya, makanya dia menegaskan harus PLN yang menjadi pemasok utama, supaya ada kontinuitas. Ansar menambahkan ketersediaan listrik diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pulau-pulau apalagi dia yakin kualitas anak-anak pulau tidak kalah dengan yang berada di kota-kota. Selain masalah pasokan listrik, masalah tidak layaknya pelantar rumah beberapa warga yang berada di pesisir pantai ke laut. Untuk itu perlu adanya rehabilitasi pelantar rumah warga agar layak pakai. Dan terakhir masalah kurang tinggi dan sudah runtuhnya beberapa bagian dinding parit. Untuk itu perlu perbaikan agar keadaan saluran parit lebih layak dan memadai. yang menjadi pemasok utama, supaya ada kontinuitas. Nurdin menambahkan ketersediaan listrik diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pulau-pulau apalagi dia yakin kualitas anak- anak pulau tidak kalah dengan yang berada di kota-kota. Selain masalah pasokan listrik, masalah tidak layaknya pelantar rumah beberapa warga yang berada di pesisir pantai ke laut. Untuk itu perlu adanya rehabilitasi pelantar rumah warga agar layak pakai. Dan terakhir masalah kurang tinggi dan sudah runtuhnya beberapa bagian dinding parit. Untuk itu perlu perbaikan agar keadaan saluran parit lebih layak dan memadai.

5. Sosial Budaya

Pulau Penyengat dikenal sebagai Pulau dengan destinasi sejarah dan sosial budayanya. Paling tidak orang akan lebih mengenal budaya melayu di Pulau Penyengat. Untuk itu, dalam memanjakan para wisatawan dalam memperkenalkan Pulau Penyengat perlu adanya sosial budaya yang baik, kreatif, dan terampil. Dalam melaksanakan studi pengabdian, kami mendapat beberapa kendala dalam perkembangan sosial budaya di Pulau Penyengat. Hal ini dilihat dari minimnya minat baca seni Al - quran. Seni baca Al-quran merupakan salah ikon dari Pulau Penyengat dengan sejarah histori keagamaan yang ada di pulau tersebut. Kemudian perlunya ketersediaan alat-alat musik tradisional marawis dan lain-lain dimana belum memadainya ketersediaan alat - alat musik sedangkan antusias masyarakat sangat tinggi dibidang seni marawis dan tradisional. Hal ini menjadi masalah mengingat untuk memajukan pariwisata Pulau Penyengat perlu adanya memperkenalkan seni musik asli melayu yang menjadi daya tarik tersendiri dibanding dengan daerah lain.

Gambar 3. Peninggalan Budaya Alqur'an dengan tulisan tangan di Masjid Pulau Penyengat



Sumber :Data Sekunder, 2021.

Masjid Raya Sultan Riau Penyengat merupakan salah satu peninggalan masa kejayaan Kesultanan Riau yang dibangun pada 7 Rabiulawal 1218 H (1803 M). Masjid Raya Sultan Riau merupakan salah satu masjid tua dan bersejarah di Indonesia. Masjid ini berada di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Uniknya, salah satu campuran bahan bangunan yang digunakan pada masjid ini adalah putih telur.

Masjid dibangun pada 1761 hingga 1812. Saat itu kondisinya masih berupa bangunan kayu dan berlantaikan batu bata. Hingga pada masa kepemimpinan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, yakni Sultan Kerajaan Riau Lingga pada tahun 1832, seluruh rakyat diajak bergotong royong dan beramal memugar masjid. Masjid memiliki 12 buah kubah dengan empat buah menara yang menjulang. Pada Festival Istiqlal tahun 1995, Masjid Raya Sultan Riau ini merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan kubah.

Gambar 4. Tampak interior Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat



Sumber : Data Sekunder, 2021

Kehidupan sosial budaya masyarakat di pulau penyengat saat ini di atur oleh lembaga pemerintah dan pranata sosial lainnya untuk menuju ke arah pembaharuan masyarakat modern. Pranata sosial itu berupa kelompok sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, dan sistem pelapisan sosial. Lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial ini mempersatukan semua anggota yang terdiri dari berbagai suku bangsa agar dapat hidup bersama dan bertoleransi. Kegiatan kemasyarakatan dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong bersama. Sistem gotong-royong ini merupakan salah satu tradisi budaya yang masih dipertahankan dan tetap terjaga dengan baik. Musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama juga terlihat pada saat diadakan antar warga di RT, RW, dan lingkungan tempat tinggal lainnya. Kegiatan organisasi sosial juga berjalan dengan baik dan dinamis karena menerapkan azas kepentingan bersama.

Kebudayaan Melayu identik dengan Kerajaan Malaka dan bahasa Melayu berkembang pesat sebagai bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi hubungan perniagaan. Selain itu, agama Islam yang sudah menjadi agama resmi orang Melayu merupakan sendi dasar kebudayaan Melayu yang membentuk unsur-unsur kebudayaan Melayu lainnya seperti adat istiadat dan nilai-nilai di dalam kehidupan. Islam Pulau Penyengat ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan dan adat istiadat karena adanya tradisi, nilai-nilai budaya, dan Agama Islam yang sangat berperan didalam perkembangan Pulau Penyengat. Bahasa Melayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan Agama yang telah lama menjiwai kebudayaan Melayu menjadi ukuran, nilai-nilai, ketentuan-ketentuan yang menyelaraskan tindakan-tindakan atau perilaku penduduk setiap hari. Sehingga terkenal istilah "adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah (Al Quranil Azim)", hal ini terkait dengan adanya tiga prinsip pokok dalam kehidupan masyarakat Melayu yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam.

6. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor atau menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* selaku penyelenggara pemerintahan. Namun kebanyakan media bahkan orang awam lebih memerhatikan perekonomian di kota-kota besar tanpa menyadari atau mengulik perekonomian di pulau-pulau. Untuk itu dalam usaha meningkatkan ekonomi khususnya nelayan di Kelurahan Penyengat dan ketersediaan ikan tangkapan nelayan yang sudah sangat kurang disekitaran laut

Pulau Penyengat. Dalam hal ini beberapa bantuan dari pemerintah seperti alat bantu tangkap ikan dan pembuatan Rumpun Rumah Ikan agar ketersediaan ikan meningkat. Namun yang terjadi dilapangan tidak terealisasi secara maksimal dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut tidak menggunakan secara semestinya Kemudian Pulau Penyengat yang merupakan destinasi wisata religi yang sering dikunjungi wisatawan perlu adanya oleh-oleh khas Pulau Penyengat. Kuliner ini disajikan dengan cara kearifan lokal yang masyarakat setempat memberi gelar "Makan Beridang" atau makan di lantai dengan beralaskan tikar dan "seprah" kain yang di bentangkan di hadapan para tamu yang diatasnya akan di hidangkan sajian santapan kuliner lokal salah satunya gonggong yang berbetuk keong kecil

Gambar 5. Oleh-Oleh Makanan Khas Pulau Penyengat, Gonggong.



Sumber : Data Sekunder, 2021

Hal ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan dan mendongkrak perekonomian di pulau tersebut. Dalam hal ini, memaksimalkan usaha mengembangkan dan memberdayakan masyarakat Pulau Penyengat untuk Pelaku UKM agar lebih kreatif dan inovatif. Salah satu contoh dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah sampah yang ada menjadi barang bermanfaat. Barang tersebut yang kemudian dapat dikemas dan menjadi oleh-oleh khas Pulau Penyengat. Selain ramah lingkungan dengan berkurangnya sampah disamping itu juga masyarakat Pulau Penyengat memiliki pendapatan tambahan.

Startegi Potensi Partisipasi Pembangunan Sosial di Pulau Penyengat

Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, masih banyak area-area yang tidak dijaga dan dikelola dengan baik. Salah satunya adalah sampah yang berserakan di area cagar budaya dan juga dibawah rumah-rumah panggung masyarakat. Memang hal tersebut bisa saja kemungkinan terjadi karena wisatawan atau juga sampah yang dibawa arus dari laut sehingga terdampar di pinggiran pantai pulau penyengat. Namun dalam hal ini kondisi tersebut sebenarnya perlu diperhatikan oleh masyarakat demi terciptanya kenyamanan dan kebersihan pulau penyengat. Kemudian ada taman di dekat jalan menuju balai adat, dimana taman tersebut terdapat permainan anak-anak yang dalam keadaan rusak, seharusnya hal itu perlu segera diperbaiki agar bisa digunakan oleh anak-anak di pulau penyengat dan tidak tidak terabaikan begitu saja.

3 jenis kegiatan yang populer dalam mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau penyengat juga sebagai potensi yang ada di pulau penyengat ini, yaitu diantaranya Becak Motor dan Penambang Pompong yang rata-rata didominasi oleh kaum pria dan juga penjual makanan dan souvenir yang didominasi oleh kaum wanita. Disamping itu mereka memiliki usaha turun-temurun yaitu penjual kue Deram-deram yang merupakan makanan khas dari pulau penyengat. Mengenai tujuan usaha yang dimiliki, kebanyakan dari mereka memiliki usaha untuk menghidupi keluarga atau dalam kata lain adalah sumber penghasilan mereka. Masyarakat yang memiliki kegiatan usaha seperti becak motor dan perahu pompong pada

awalnya memiliki usaha sendiri dengan modal kecil dan adapula penambang pompong yang memiliki perahunya sendiri. Kemudian pemerintah memberikan dana bantuan yang tujuannya untuk membantu mengembangkan usaha mereka dalam perbaikan dan menambah kapasitas dari fasilitas tersebut disamping tujuan pemerintah untuk mempermudah pengunjung dalam akses menuju suatu tempat.

Maka berdasarkan informasi yang didapat, tujuan utama mereka dalam memiliki kegiatan usaha adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa mereka telah ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha untuk mengembangkan pariwisata yang ada di pulau penyengat dengan tugas sebagai pelaku wisata dalam menyampaikan informasi dan juga menghantarkan pengunjung ke objek wisata di pulau penyengat. Masyarakat pulau penyengat memiliki adat istiadat dan budaya asli melayu, ini merupakan sebuah potensi yang bisa dikelola masyarakat itu sendiri. Kendala yang terbesar berdasarkan pengamatan kami, jika masyarakat tidak lagi menilai bahwa potensi yang besar di pulau penyengat menjadi salah satu hal yang dapat dikembangkan, dengan kata lain masyarakat malah memilih untuk bekerja diluar penyengat atau malah pindah dari pulau penyengat sehingga yang tinggal hanya orang-orang tua saja yang Mana apabila itu terjadi, pulau penyengat akan menjadi objek wisata unggulan yang mati dan membosankan bagi para pengunjung.

Potensi yang ada di pulau penyengat sebagai kajian dalam menggali potensi yang ada di pulau penyengat dalam aspek kajian pembangunan partisipatif dalam pembangunan tepat daya guna sebagai peruntukan pembagunan di masyarakat yang mengarah pada kebutuhan yang dapat di selaraskan dalam pemanfaatan. Beberapa potensi yang dituangkan dalam tulisan yang membahas segala aspek temuan dilpangan dalam hal material maupun non material yang dapat dikaji mejadi sebuah potensi yang berdasar kan kearifan lokal didalam masyarakat pulau penyengat itu sendiri sehingga unsur didalamnya tidak tertinggal dengan beriringan digerus oleh waktu serta zaman yang terlihat mengesampingkan kajian atas dasar kearifan lokal. Berikut hal yang kami temukan sebagai kajian yang dibahas secara selektif dalam menentukan kajian yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :

- a. Potensi sebelah utara pelabuhan yang kurang pemanfaatan dalam hal peruntukan kelompok mengambil kesimpulan membentuk pasar terapung seperti di daerah yang ada di Indonesia yang sudah ada sebelumnya dan eksis sampai saat ini pemanfaatannya
- b. Potensi masjid sebagai kajian Islamic centre dalam pemanfaatn kegiatan peribadahan umat islam di tanah melayu.
- c. Perpustakaan yang telah ada agar dapat diselaraskan kedalam hal kajian sebagai pusat pembelajaran sejarah pulau penyengat dan sebagai acuan masyarakat yang ingin memperoleh informasi dalam hal yang dlestarikan maupun dilindungi dalam aspek sejarah
- d. Balai adat yang dikembangkan sebagai sarana tempat bertransaksi sentra oleh-oleh ataupun kegiatan ekonomi masyarkat penyengat agar menjadi dayak darik animo pengunjung pulau penyengat apabila ingin memperoleh cindra mata maupun buah tangan menjadi ciri khas kearifan local pulau penyengat
- e. Lapangan dalam kajian pengembangan sarana dan pra sarana dalam penyedia venue olahraga
- f. Perkebunan dalam sentra ini meningkatkan hasil panen yang ada di pulau penyengat sebagai penyedia akan kebutuhan konsumsi masyrakat dalam mencukupi kebutuhan sayuran maupun buah-buahan dan pemasok di pasar pasar yang ada.
- g. Tumbuhan daun mangkok sebagai ciri khas tanaman sebagai pelengkap makanan tradisional khas melayu dan menjadi kearifan local dalam penyajian makanan untuk dihidangkan.

KESIMPULAN

Dalam merealisasikan Partisipatif pada pengembangan pembangunan sosial di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang, masalah yang dimaksud adalah mengidentifikasi masalah yang kita ingin amati, solusi yang kita ingin laksanakan, dan metode yang apa akan digunakan untuk mencapai penyelesaian masalah, konfrontasi, dan dengan bujukan atau bernegosiasi untuk mencapai tujuan masyarakat. Dari hasil pengabdian masyarakat yang kami lakukan, dapat disimpulkan permasalahan yang kami temukan di Pulau Penyengat, terkait masalah pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Pendidikan yang minim karena ketersediaan sekolah yang belum memadai sehingga mengharuskan para siswa untuk sekolah keluar pulau. Selain itu akibat kemiskinan yang mengharuskan untuk putus sekolah menjadi kendala utama pendidikan di Pulau Penyengat. Pelayanan kesehatan yang

belum maksimal akibat kondisi kepulauan yang mengharuskan melewati laut dan kekurangan tenaga medis yang bisa stay 24 jam.

Kemudian masalah sampah yang tidak terurus, kurangnya pasokan listrik, kerusakan infrastruktur lain seperti parit dan lata kelola pelantar yang tidak terurus, serta perkembangan ekonomi yang merosot akibat pemberdayaan masyarakat setempat yang kurang maksimal. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan keterbelakangan yang terjadi di Pulau – pulau kecil. Terutama pulau penyangat yang menjadi pulau bersejarah. Hal ini juga harus didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada dipulau penyangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, E. S. (2009) Alternatif Strategi Pembangunan Sosial untuk Indonesia.
- Barska, A., J. J., Wyrwa, J., & Kononowicz, K. (2020). Multidimensional Assessment of the Social Development of EU Countries in the Context of Implementing the Concept of Sustainable Development. *Sustainability*, 12(18), 7821.
- Belaid, L., Ochola, E., Bayo, P., Alii, G. W., Ogwang, M., Greco, D., & Zarowsky, C. (2021). Exploring the impact of a community participatory intervention on women's capability: a qualitative study in Gulu Northern Uganda. *BMC women's health*, 21(1), 1-12.
- Cao, H. T., & Zhang, Q. (2019). On the Combination of Shared Development Concept and Social Engineering. *Journal of Mudanjiang Normal University (Social Sciences)*.
- Kelly, A., & Westoby, P. (2018). *Participatory development practice: Using traditional and contemporary frameworks*. Practical Action Publishing Ltd.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage.
- Zhou, R., & Kaplanidou, K. (2018). Building social capital from sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport events on the community. *Sport Management Review*, 21(5), 491-503.
- Sardak, S., Korneyev, M., Simakhova, A., & Bilskaya, O. (2017). Global factors which influence the directions of social development. *Problems and Perspectives in Management*, (15, Iss. 3 (contin. 2)), 323-333.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Jones, D. N., & Truell, R. (2012). The global agenda for social work and social development: A place to link together and be effective in a globalized world. *International Social Work*, 55(4), 454-472.
- Siau, K., & Long, Y. (2006). Using social development lenses to understand e-government development. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 14(1), 47-62.
- Puspitasari, R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 59-74.
- Huruswati, I. (2015). Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Desa Tertinggal melalui Rumah Sosial. *Sosio Konsepsia*, 4(2), 73-90.

Kontribusi Vol 1 - 2021

Alfatina; Journal of Community Services memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra bestari atas dedikasinya dalam proses review selama tahun 2021 untuk menjaga kualitas artikel yang diterbitkan.

Mitra Bestari

Alexsander Yandra | Affiliation: Universitas Lancang Kuning

Amril Hans | Affiliation: Universitas Hasanuddin

Bunga Chintia Utami | Affiliation : Universitas Riau

Dedri Syefei | Affiliation : STT Pelalawan

Dwi Kristanti | Affiliation : Universitas Terbuka
Edison Edison | Affiliation :Universitas Maritim Raja Ali Haji
Fifi Nofiyanti| Affiliation : Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Gading Gamaputra | Affiliation : Universitas Negeri Surabaya
Ilhamsyah Ilhamsyah | Affiliation : Universitas Tanjungpura
Masyitoh Masyitoh |Affiliation : Universitas Indonesia
Muhammad Sofyan |Affiliation :Institut Teknologi PLN
Muhammad Yusran Darmawan |Affiliation : IPB University
Mora Dingin | Affiliation : World Resources Institute
Nurul Safitri | Affiliation : Universitas Indonesia
Pangi Syarwi Chaniago |Affiliation : Voxpol Center Research & Consulting
Rima Ranintya Yusuf |Affiliation : Politeknik STIA LAN Jakarta